



# **L K I P 2021**

## **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
BEKASI**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur, LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat kami harapkan. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Bekasi,            Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

DR. RENY HENDRAWATI, M.M.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018- 2023 beserta perubahannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (lima) Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dengan hasil **capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 116,34 persen**, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **SANGAT BAIK** dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran staratgis 1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 125,15%
2. Pencapaian sasaran staratgis 2 meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah, terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 102,10%
3. Pencapaian sasaran staratgis 3 Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD, terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dengan capain sebesar 121,76%

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2021 dinyatakan “melampaui target”, karena capaiannya rata-rata sebesar

116,10% dari target, dengan rata-rata capaian indikator strategis melebihi target yang sudah di tetapkan.

Ke depan untuk mencapai visi Walikota Bekasi berupa terwujudnya Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan melalui pelaksanaan misi kesatu yaitu : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi dan *stakeholder* yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah Kota Bekasi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 180,395,508,914,- telah direalisasi sebesar Rp161,255,445,635,-. Atau 89,39% Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi.....	14
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	18
1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	20
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	25
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	26
2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah .....	27
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	29
2.1.4 Strategi, Program dan Kegiatan .....	30
2.2 Perjanjian Kinerja .....	34
2.3 Rincian Anggaran Tahun 2021 .....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>39</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	41
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	91
3.4 Prestasi Dan Penghargaan.....	95
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
4.1 kesimpulan .....	97
4.2 Rencana Tindak .....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100
LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja.....	101
LAMPIRAN II Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021 .....	108
LAMPIRAN III Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....	111
LAMPIRAN IV Prestasi Dan Penghargaan.....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian .....	21
Tabel 1-2	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	21
Tabel 1-3	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan .....	22
Tabel 1-4	Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....	23
Tabel 2-1	Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023 .....	26
Tabel 2-2	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 beserta perubahannya .....	28
Tabel 2-3	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....	30
Tabel 2-4	Strategi, Program dan Kegiatan .....	32
Tabel 2-5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi .....	35
Tabel 2-6	Alokasi Anggaran Per Triwulan (Perubahan) .....	36
Tabel 2-7	Anggaran Per Kegiatan (Perubahan) .....	36
Tabel 3-1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 .....	41
Tabel 3-2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat .....	43
Tabel 3-3	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat .....	45
Tabel 3-4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	46
Tabel 3-5	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat .....	46
Tabel 3-6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat .....	48
Tabel 3-7	Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan .....	49
Tabel 3-8	Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2021 .....	50
Tabel 3-9	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan .....	53
Tabel 3-10	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	54
Tabel 3-11	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan .....	55
Tabel 3-12	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2021 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan .....	57
Tabel 3-13	Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi .....	59
Tabel 3-14	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi .....	59
Tabel 3-15	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi .....	62

Tabel 3-16	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Target Akhir Renstra 2018-2023.....	63
Tabel 3-17	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi .....	64
Tabel 3-18	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat.....	65
Tabel 3-19	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021.....	66
Tabel 3-20	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA.....	67
Tabel 3-21	Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi .....	67
Tabel 3-22	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.....	69
Tabel 3-23	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023.....	70
Tabel 3-24	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA.....	71
Tabel 3-25	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA.....	72
Tabel 3-26	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA .....	73
Tabel 3-27	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	74
Tabel 3-28	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA.....	75
Tabel 3-29	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2018-2023.....	75
Tabel 3-30	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai IKM SETDA .....	76
Tabel 3-31	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2021 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA.....	78
Tabel 3-32	Perbandingan IKM Setda Semester II dengan OPD lain.....	78
Tabel 3-33	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas .....	81
Tabel 3-34	Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 dan 2021 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi .....	82
Tabel 3-35	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.....	85
Tabel 3-36	Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi .....	86
Tabel 3-37	Peringkat Nilai AKIP Daerah Regional Jawa Barat .....	88
Tabel 3-38	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	89
Tabel 3-39	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas .....	89

Tabel 3-40	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas .....	90
Tabel 3-41	Perubahan Target kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah .....	91
Tabel 3-42	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2020 91	
Tabel 3-43	Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2021 .....	92
Tabel 3-44	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 .....	92
Tabel 3-45	Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.....	95
Tabel 4-1	Capaian dari IKU tahun 2021.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.....	18
Gambar 1-2	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah .....	21
Gambar 1-3	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	22
Gambar 1-4	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah .....	22
Gambar 1-5	Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan .....	23
Gambar 3-1	Grafik Perkembangan Nilai EPPD Kota Bekasi Tahun 2018-202044	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretaris Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2021 menuju perwujudan Visi Kota Bekasi yaitu :

**“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”**

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan Misi pertama **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dengan Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator kinerja **“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**, **“Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EPPD”** dan **“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”**

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimana indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercantum dalam perubahan tersebut adalah :

1. Indikator Kinerja utama **Persentase Capaian IKK yang meningkat** untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.

2. Indikator Kinerja utama (1) **Indeks Pelaksanaan Pembangunan;** dan (2) **Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi;** untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD.
3. Indikator Kinerja utama (1) **Nilai AKIP SETDA;** (2) **Nilai IKM SETDA;** dan (3) **Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas;** untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke ke-I RPJMD kota bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian 8 (delapan) area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana lima area perubahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dilaksanakan dengan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector*.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2020 dimana capaian indikator yang ukur masih menggunakan indikator kinerja berdasarkan Peraturan wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi sebesar 100 persen, indikator Persentase Capaian

IKK yang meningkat memperoleh capaian kinerja sebesar 172,42 persen, indikator Nilai IKM memperoleh capaian kinerja sebesar 104,2 persen, indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) memperoleh capaian kinerja sebesar 222,22 persen, indikator Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat memperoleh capaian kinerja sebesar 66,67 persen, maka pada tahun 2021 Sekretariat Daerah harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2020 maupun target yang telah ditetapkan pada Renstra pada tahun 2021. Adapun kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 dimana indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Pada tahun 2021 sesuai dengan Renstra Perubahan, Sekretariat Daerah tidak lagi memakai indikator Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.
2. Untuk indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 172,42 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 65,52 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 38 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah 38 persen, maka tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa IKK
3. Untuk indikator Nilai IKM pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 105 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 83 nilai indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79 nilai indeks. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 adalah 80 nilai indeks, dimana artinya tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa Nilai IKM pada tahun 2020 minimal sebesar 83,01 nilai indeks atau meningkat dari realisasi tahun 2019.

4. Untuk indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 312 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 32 persen. Target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 sebesar 45 persen, maka tantangan kedepan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa Peningkatan Kualitas AKIP OPD tidak hanya pada kategori B tapi meningkat pada BB atau A.
5. Untuk indikator Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 50 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 50 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen maka tantangan kedepan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah memastikan bahwa Persentase BUMD Dalam Kondisi Sehat pada tahun 2020 meningkat sebesar 50 persen. Adapun upaya yang dilakukan di tahun 2020 adalah :
  - a. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
  - b. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
  - c. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
  - d. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
  - e. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD;
  - f. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence).

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas

pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2020 ini.

## **1.2 Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Organisasi**

### **Kedudukan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

### **Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah memiliki tugas tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum untuk mencapai visi dan misi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;

- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- l. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Susunan Organisasi Sekretariat Daerah**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;

- e. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
  - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
    - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - c) Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan.
  - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - c) Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Tatalaksana;
    - b) Sub Bagian Kelembagaan;
    - c) Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur.
  - 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
    - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
    - c) Sub Bagian Pengendalian.
- f. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Bagian Pembangunan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Pembangunan.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Bina Sosial;
    - b) Sub Bagian Bina Keagamaan;
    - c) Sub Bagian Bina Pendidikan.
  - 3. Bagian Kerjasama, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama;
    - b) Sub Bagian Tata Kelola Kerjasama;
    - c) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.

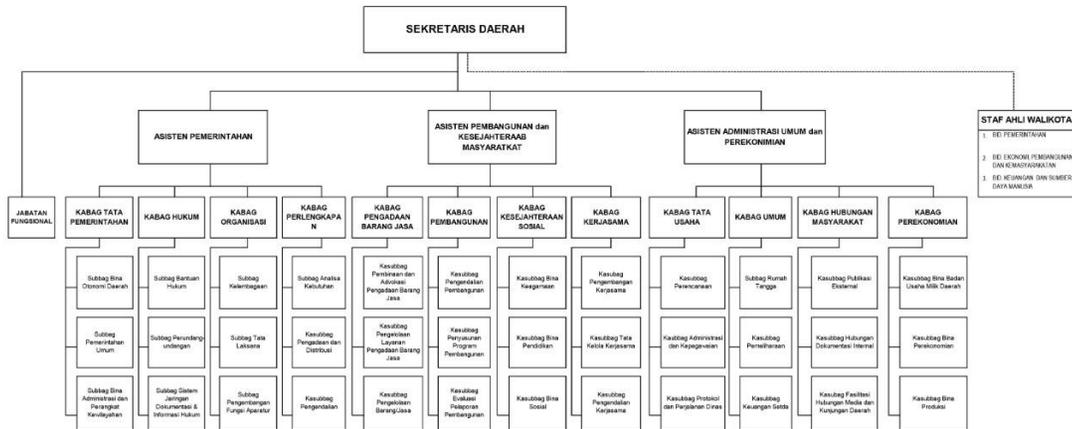
4. Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
  - c) Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- g. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, membawahkan:
  1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - b) Sub Bagian Pemeliharaan;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
    - c) Sub Bagian Perencanaan Setda.
  3. Bagian Humas, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Publikasi Eksternal;
    - b) Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal;
    - c) Sub Bagian Fasilitasi Kunjungan Daerah.
  4. Bagian Perekonomian, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
    - b) Sub Bagian Bina Produksi;
    - c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah seperti pada gambar berikut:

**Gambar 0-1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH



### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang memiliki peranan terhadap pelaksanaan:

**“perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya”.**

Dalam melaksanakan perannya sebagai instansi yang memastikan bahwa pencapaian visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota maju, sejahtera dan ihsan didukung oleh kebijakan yang tepat, koordinasi yang efisien dan organisasi yang tepat ukuran, Sekretariat Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governace*. Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan profesionalisme dan mutu

layanan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki tugas lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan. Adapun permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Belum Optimalnya pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Belum Optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
- e. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Bekasi merumuskan program dan kegiatan yang merujuk kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran dengan Indikator kinerja yang terukur yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bekasi.

#### **1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan beberapa layanan publik yang dilaksanakan oleh 11 unit layanan dan sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Jasa Surat Menyurat ke OPD
2. Jasa Surat Menyurat ke Masyarakat
3. Layanan Keprotokolan
4. Layanan Penyerahan Piala/Plakat
5. Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
7. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
8. Penyusunan Standar Biaya Berbasis SIPD melalui aplikasi SIHARSA
9. Layanan Administrasi dan Fasilitasi BUMD
10. Desk LPPD
11. Desk SAKIP
12. Harmonisasi Produk Hukum Daerah
13. Penomoran Produk Hukum Daerah
14. Layanan LPSE
15. Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang
16. Fasilitasi Kunjungan Daerah ke Pemerintah Kota Bekasi
17. Pelayanan Informasi Publik ke Pemerintah Kota Bekasi
18. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi
19. Fasilitasi Pengkajian Kelayakan Rencana Kerja Sama
20. Layanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerjasama
21. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan layanan adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kota Bekasi didukung

oleh sumber daya manusia sebanyak 401 orang per 30 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

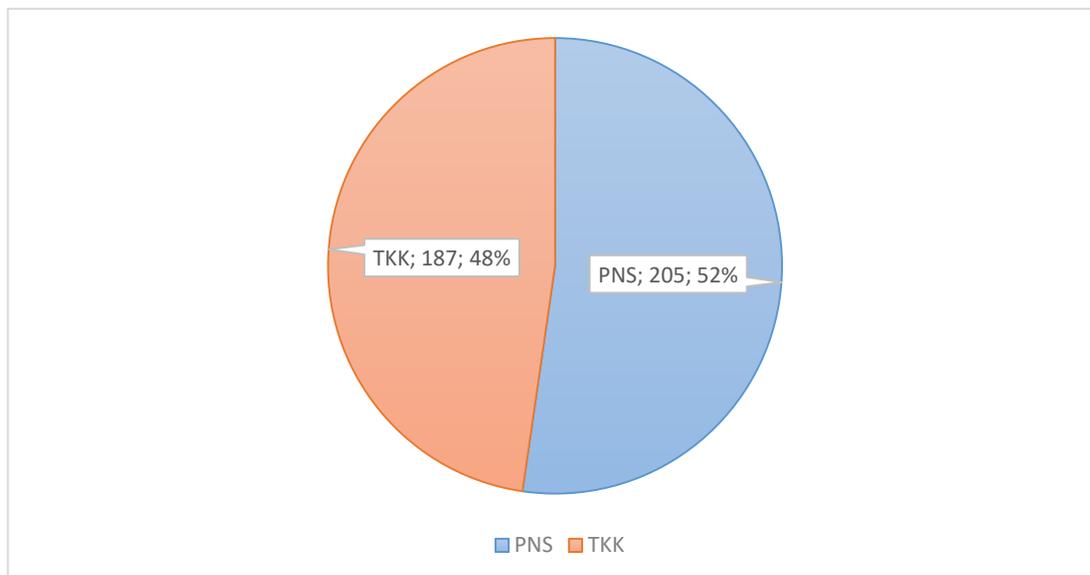
**Berdasarkan Status Kepegawaian**

**Tabel 0-1**  
**Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**

PNS	TKK
205	187

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 31 Desember 2021

**Gambar 0-2**  
**Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah**  
**Kota Bekasi Berdasarkan Status Kepegawaian**



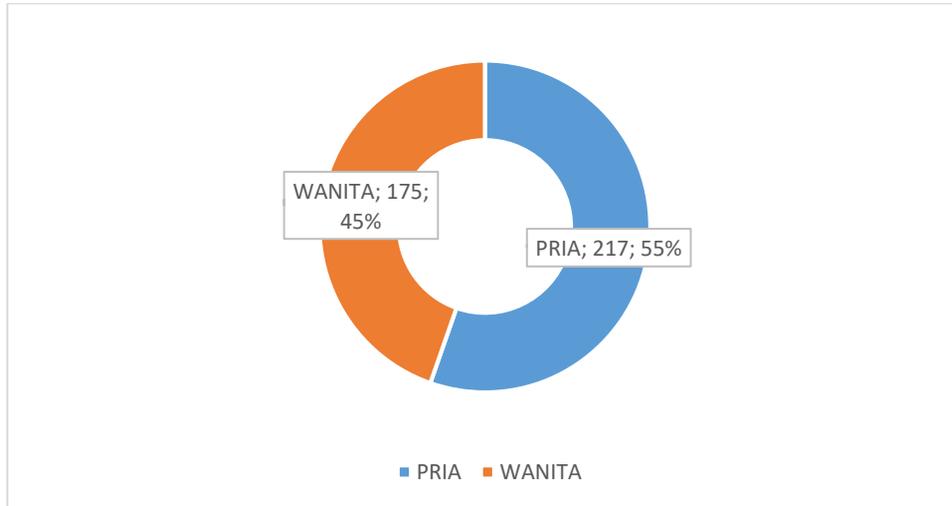
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 0-2**  
**Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

PRIA	WANITA
217	175

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 31 Desember 2021

**Gambar 0-3**  
**Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin**



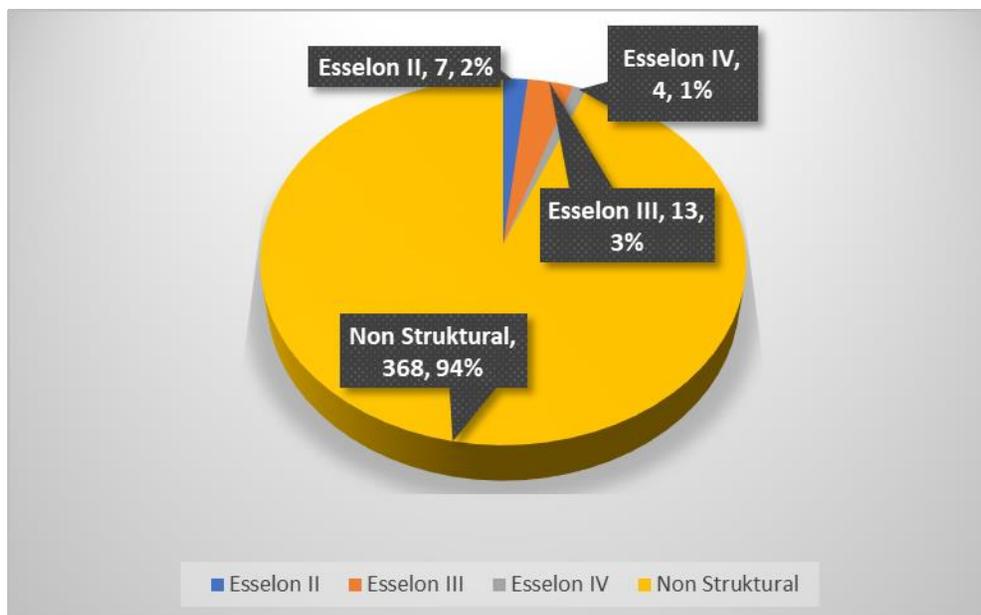
**Berdasarkan Jabatan**

**Tabel 0-3**  
**Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan**

NO	ESSELONERING	JUMLAH APARATUR
1	Esselon II	7
2	Esselon III	13
3	Esselon IV	4
4	Non Struktural	368

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 31 Desember 2021

**Gambar 0-4**  
**Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jabatan**



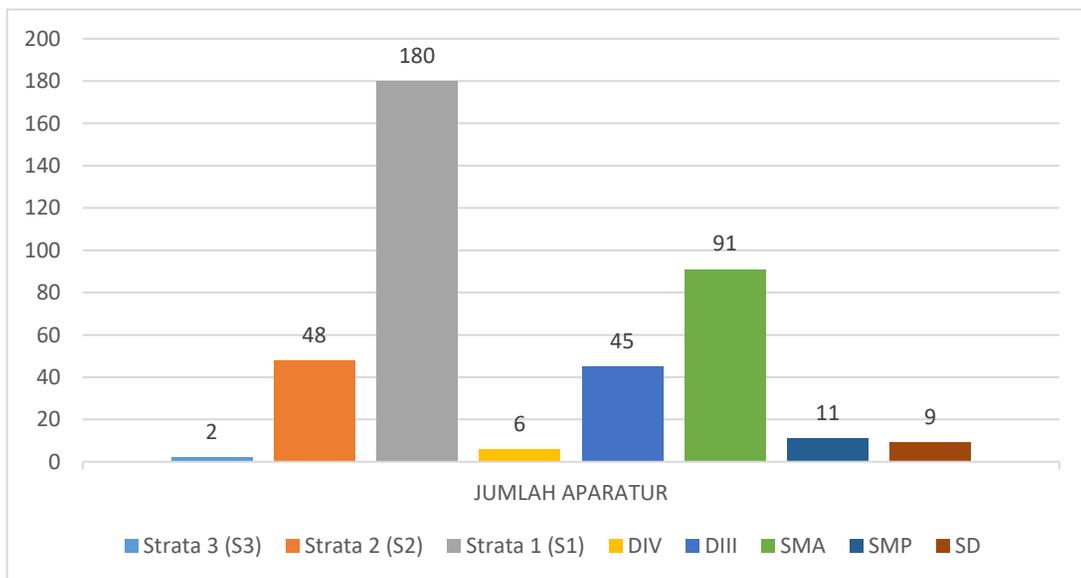
Berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 0-4**  
**Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	55
3	Strata 1 (S1)	205
4	DIV	1
5	DIII	41
6	SMA	79
7	SMP	13
9	SD	6

Sumber : Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda, Per 31 Desember 2021.

**Gambar 0-5**  
**Grafik Data Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan**



## 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018-2023
- B. Tujuan
- C. Sasaran Strategis
- D. Sasaran Program
- E. Indikator Kinerja Utama
- F. Program dan Kegiatan
- G. Perjanjian Kinerja 2021

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi (sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum)
- B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Akuntabilitas Anggaran (Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak kinerja)
- D. Prestasi Organisasi (mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional dalam tahun 2021)

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai strategi ini. Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Bekasi untuk melakukan proyeksi kondisi masa yang akan datang, sehingga rencana strategis dapat menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja ke masa yang akan datang.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 - 2023, ditetapkan visi Pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi adalah “**Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan**”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, sebagaimana dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 0-1**  
**Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Perubahan Kota Bekasi**  
**2018-2023**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan	meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
	membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar
	meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif yang berdaya saing	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan focus pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya iklim usaha dan investasi
			Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
			meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
			meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa
			Meningkatnya daya beli masyarakat
	Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia dan inovatif	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi kreatif dan inovasi
			Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat
			Meningkatnya kesejahteraan social dan keluarga
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Terbangunnya masyarakat yang religious dan berakhlak mulia
	Membangun dan meningkatkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kehesi social yang kuat
			Terwujudnya upaya kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana
			Terwujudnya daya dukung lingkungan kota yang berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pada pelaksanaan misi ke satu yaitu **“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”** untuk membangun Kota Bekasi. Secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

### 2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran, dalam RPJMD yang sesuai dengan kedudukan Sekretariat Daerah yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 sebagai unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya dimana dalam hal ini berdasarkan rumusan visi dan misi makan tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota

Bekasi selama 5 tahun adalah : **Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah.**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 0-2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun 2019 – 2023 beserta perubahannya**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Tujuan :</b>							
	<b>Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah</b>	<b>Nilai AKIP Kota (Lama)</b>	<b>Nilai</b>	<b>64</b>	<b>65,8</b>	-	-	-
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.</b>	<b>Persen</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Sasaran :</b>							
	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah (Lama)	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi. (Lama)	Persen	100	100	-	-	-
		Nilai IKM (Pindah Sasaran)	Nilai	79	80	-	-	-
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan social (Baru)	Persentase Capaian IKK yang meningkat (Tetap)	Persen	38	38	39	39	40
	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah (Lama)	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke atas) (Lama)	Nilai	32	45	-	-	-
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan (Baru)	Indeks Pelaksanaan Pembangunan (Baru)	Nilai	-	-	84	86	88
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi (Baru)	Persen	-	-	100	100	100
	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD (Lama)	Persentase BUMD yang sehat (Lama)	Persen	100	100	-	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan	Nilai AKIP SETDA (Baru)	Nilai	-	-	A	A	A
		Nilai IKM SETDA (Pindah Sasaran)	Nilai	-	-	81	82	83

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	akuntabilitas kinerja	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas (Kategori A) (Baru)	Persen	-	-	11.36	15.90	22.73

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

Pada tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018-2023 maka dilakukan perubahan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi dimana perubahan dilakukan pada indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja.

### 2.1.3 Indikator Kinerja Utama

IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan yang ada.

Pada penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2018-2023, namun pada perjalanannya dilakukan penyesuaian pada indikator sasaran Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan. Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2018-2023 dengan Wali Kota Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian IKU Wali Kota yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah menurut Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perubahan beserta rumus perhitungan dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

**Tabel 0-3**  
**Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Untuk mengetahui jumlah IKK yang meningkat	(Capaian IKK yang meningkat / Seluruh Jumlah IKK) x 100%	Persen	39
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Untuk mengukur Kinerja Pengendalian Pembangunan dan Kinerja Layanan Pengadaan	(Realisasi Pelaksanaan Kegiatan x 80%) + {(Jumlah Pengadaan sesuai ketentuan/ Jumlah pengadaan yang difasilitasi)x40%)+(Indeks kepuasan masyarakat bagian PBJx60%)x20%	Persen	84
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Untuk mengukur Kinerja Pengawasan BUMD	(Jumlah BUMD yang dibina dan diawasi / jumlah BUMD) x 100%	Persen	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik	hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bekasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Nilai	A
		Nilai IKM SETDA	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Pengukur dan meningkatkan kinerja instansi, sebagai dasar penilaian untuk memberikan reward maupun punishment, dan menghindari praktik KKN dalam pengelolaan manajemen instansi pemerintahan	(Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SAKIP berkualitas A / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Persen	11,36

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

#### **2.1.4 Strategi, Program dan Kegiatan**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi

pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan

menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 0-4**  
**Strategi, Program dan Kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Wilayah Fasilitasi
				Pelaksanaan Otonomi Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
				Fasilitasi Kerjasama Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Wilayah Fasilitasi
				Pelaksanaan Otonomi Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Program Administasi Umum	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 Perubahan, 2021

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Sebagai Berikut :

**Tabel 0-5**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	39	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	39
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	84	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	A
		Nilai IKM SETDA	Angka	81	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	81
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	11,36	Triwulan I	-
					Triwulan II	11,36
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 perubahan tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II.a) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Pada penetapan APBD Kota Bekasi Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.190.610.302.856 yang digunakan untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 3 program untuk kemudian terkoreksi pada APBD-P menjadi sebesar

Rp.180.395.508.914 untuk melaksanakan 19 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran per triwulan sebagai berikut:

**Tabel 0-6**  
**Alokasi Anggaran Per Triwulan (Perubahan)**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	TRIWULAN	TARGET
1	Program Administrasi Umum	144.296.518.614	Triwulan I	33.680.565.813
			Triwulan II	47.528.289.981
			Triwulan III	31.397.290.923
			Triwulan IV	31.690.371.897
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat	29.427.893.500	Triwulan I	3.845.735.650
			Triwulan II	1.899.631.350
			Triwulan III	6.927.092.250
			Triwulan IV	16.755.434.250
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.671.096.800	Triwulan I	751.305.000
			Triwulan II	1.795.703.800
			Triwulan III	736.228.800
			Triwulan IV	3.394.544.200

### 2.3 Rincian Anggaran Tahun 2021

Sedangkan rincian anggaran per kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 0-7**  
**Anggaran Per Kegiatan (Perubahan)**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>144.296.518.614</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.165.313.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.090.313.000
4.01 . 4.01.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>110.410.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.450.000
4.01 . 4.01.01.01.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	79.960.000
<b>4.01 . 4.01.01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
4.01 . 4.01.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>4.01 . 4.01.01.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.452.877.400</b>
4.01 . 4.01.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
4.01 . 4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.761.360.000
4.01 . 4.01.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	444.142.400
4.01 . 4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.572.375.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
4.01 . 4.01.01.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.993.292.095</b>
4.01 . 4.01.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.805.000.000
4.01 . 4.01.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	5.372.004.595
4.01 . 4.01.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.816.287.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.536.826.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
4.01 . 4.01.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.183.650.000
4.01 . 4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.153.176.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.237.039.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.427.340.000
4.01 . 4.01.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	350.000.000
4.01 . 4.01.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.309.699.000
4.01 . 4.01.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.15</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>7.494.186.619</b>
4.01 . 4.01.01.01.15.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.238.650.000
4.01 . 4.01.01.01.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	344.400.000
4.01 . 4.01.01.01.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000
4.01 . 4.01.01.01.15.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.861.136.619
<b>4.01 . 4.01.01.01.16</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>3.458.710.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.16.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	790.220.000
4.01 . 4.01.01.01.16.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	996.220.000
4.01 . 4.01.01.01.16.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.672.270.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.17</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>597.864.500</b>
4.01 . 4.01.01.01.17.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	70.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.864.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.18</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>7.000.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.18.01	Fasilitasi Keprotokolan	400000000
4.01 . 4.01.01.01.18.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.900.000.000
4.01 . 4.01.01.01.18.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.700.000.000
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>29.427.893.500</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.19</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>4.355.538.500</b>
4.01 . 4.01.01.07.19.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	0
4.01 . 4.01.01.07.19.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi	4.190.526.000
4.01 . 4.01.01.07.19.03	Pelaksanaan Otonomi Daerah	165.012.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.20</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>23.643.637.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.20.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.643.637.000
4.01 . 4.01.01.01.20.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.000.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.21</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>798.718.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.21.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	336.890.000
4.01 . 4.01.01.01.21.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	399.280.000
4.01 . 4.01.01.01.21.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	62.548.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.22</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>630.000.000</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)
4.01 . 4.01.01.01.22.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	600.000.000
4.01 . 4.01.01.01.22.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6.671.096.800</b>
4.01 . 4.01.01.01.23	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	978.640.000
4.01 . 4.01.01.01.23.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	528.640.000
4.01 . 4.01.01.01.23.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000
4.01 . 4.01.01.01.23.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0
<b>4.01 . 4.01.01.01.24</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>4.602.418.800</b>
4.01 . 4.01.01.01.24.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.000.000
4.01 . 4.01.01.01.24.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.302.418.800
4.01 . 4.01.01.01.24.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	150.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.25</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.090.038.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.25.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	628.920.000
4.01 . 4.01.01.01.25.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	321.818.000
4.01 . 4.01.01.01.25.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.300.000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>180.395.508.914</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK), dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	>91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC
6.	>30-50	Kurang	C
7.	>0-30	Sangat Kurang	D

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada setiap sasaran startegis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2021 dalam mencapai

tujuan Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah, terutama kaitannya untuk mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2021, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 Perubahan serta perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang dimana kesemua indikator mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

**Tabel 0-1**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	39	48,81%	125,15%
2.	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	84	87,53%	102,75%
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	100%	100%
		Nilai IKM SETDA	Indeks	81	105,23%	105,23%
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	11,36	18,81%	160,05%

Sumber : Data Olahan Bagian Tata Usaha Setda, 2021

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018-2023 Perubahan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan Persentase Capaian IKK yang meningkat dengan capaian kinerja 125,15 persen (terlampau).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : *pertama* Indeks Pelaksanaan Pembangunan dengan capaian kinerja 102,75 persen (terlampau) dan *kedua* Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi dengan capaian kinerja 100 persen dapat diinterpretasikan tujuan setda pada ke 2 (dua) indikator ini tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : *Pertama* Nilai AKIP SETDA dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai), *kedua* Nilai IKM SETDA dengan capaian kinerja 105,23 persen dan *ketiga* Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas dengan capaian kinerja 160,05 persen sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tujuan setda pada indikator ini tercapai.

Dengan melihat 6 (enam) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana kesemua indikator mencapai target yang ditetapkan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalime pengelolaan dan layanan pemerintah yang diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial

##### 1. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan skor hasil EPPD harus didukung dengan peningkatan capaian masing-masing IKK, dan diperhitungkan pada target RPJMD untuk memperoleh peningkatan skor dari 3,6812 pada tahun 2020, maka diperkirakan harus ada 39 persen capaian IKK meningkat. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-2**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	39	48,81	125,15%

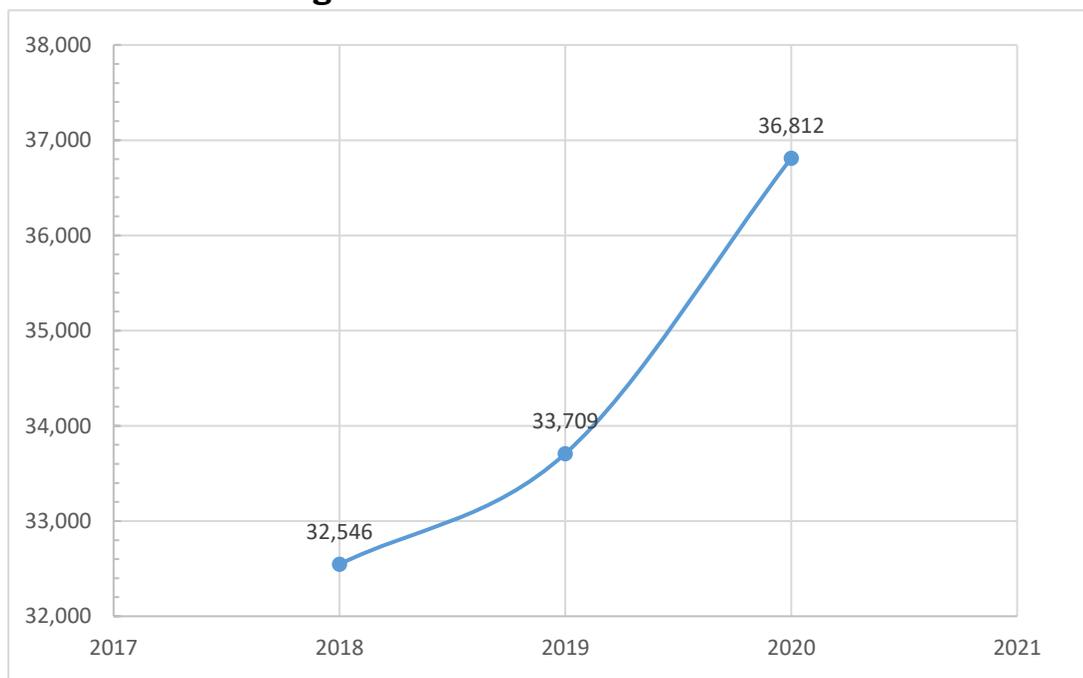
Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 39 Persen, sementara realisasi mencapai 48,81 Persen maka

capaian kinerja tahun 2021 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2021 sebesar 125,15 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2021 telah terlampaui dengan penjelasan bahwa 62 dari total 127 IKK meningkat dari tahun sebelumnya:

Terlampauinya target indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat ini, tentunya mendorong kepada peningkatan nilai EPPD tahun 2021 sebagaimana peningkatan nilai yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 seperti yang tergambarakan pada diagram berikut :

**Gambar 0-1**  
**Grafik Perkembangan Nilai EPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2020**



Sumber : Hasil EPPD terhadap LPPD Kota Bekasi tahun 2018-2020 Kemendagri

Sampai pada penyusunan LKIP ini Kemendagri belum menerbitkan nilai tahun 2021, tetapi kami optimis bahwa nilai EPPD akan mendapatkan peningkatan nilai yang signifikan mengingat tingkat ketercapaian indikator kinerja pendukung nilai EPPD Persentase Capaian IKK yang meningkat ini terlampaui sebesar 125,15.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi teknis penyusunan sekaligus penyampaian form dan pengisian IKK untuk diisi oleh masing Perangkat Daerah;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki data utama seperti Data Keuangan dan Aset dengan BPKAD, data Kepegawaian dengan BKPPD, dan program perencanaan Pembangunan dengan Bappeda, data kependudukan dengan Dispendukcapil agar tidak terjadi kerancuan data saat pengisian Indikator Kinerja Kunci;
- c. Melakukan desk terhadap data IKK pada setiap Perangkat Daerah karena setiap data IKK yang di isikan harus ada data pendukungnya;

Pencapaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

**Tabel 0-3**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase Capaian IKK yang meningkat**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Persen	50	68,18	136,36

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021, Diolah

Dengan melihat indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di tahun 2021. Capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat tahun 2021 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 0-4**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase Capaian IKK yang meningkat Target Akhir Renstra**  
**2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang meningkat	
		2021	2023
<b>Target</b>	Persen	39	40
<b>Realisasi</b>	Persen	48.81	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2021 sebesar 48,81% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 40%, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Capaian IKK yang meningkat pada perangkat daerah dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan melakukan penjagaan atas data-data capaian IKK.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Capaian IKK yang meningkat Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-5**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Capaian IKK yang meningkat**

No	Indikator Sasaran	Program/kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	165.012.500	67.428.900	40,86	100	59,14
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	165.012.500	67.428.900	40,86		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 165.012.500,00 (*seratus enam puluh lima juta dua belas ribu lima ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 67.428.900,00 (*Enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Capaian IKK yang meningkat hanya mencapai 40,86 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian IKK sebesar 48,18 persen dari target sebesar 39 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 125,15 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 59,14 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui. Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat capaian kinerja terlihat menurun hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat perubahan Indikator Kinerja Kunci yang semula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, menjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka yang sebelumnya dipergunakan IKK tataran pengambil kebijakan (IKK 2.1), pelaksana kebijakan (IKK 2.2), dan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (IKK 2.3) menjadi IKK Output dan IKK Outcome.

**Tabel 0-6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja**  
**Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2021	2020
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	Persen	65,52	48,18

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2021, diolah

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan**

**2. Indikator Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

Indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula :

$$(Realisasi Pelaksanaan Kegiatan \times 80\%) + \left\{ \left( \frac{\text{Jumlah Pengadaan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Difasilitasi}} \times 40\% \right) + (\text{Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian PBJ}) \times 60\% \right\} \times 20\%$$

Indikator ini merupakan gabungan persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah hasil reuiu terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang baru di tetapkan pada dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang langsung diaplikasikan pada tahun 2021.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-7**  
**Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	persen	84	87.53	102,75%

Sumber: Data Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2021 sebesar 84 persen, sementara realisasi mencapai 87,53 persen, maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang sebesar 104,20 persen, maka capaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 telah terlampaui sebesar 4,20 persen dari target yang telah di tetapkan.

Dalam mengukur kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bekasi, dihitung menggunakan beberapa komponen yaitu :

1. Komponen pembentuk Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang pertama adalah nilai kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dari realisasi kinerja fisik perangkat daerah dimana pada tahun 2021 ini kinerja fisik perangkat daerah sebesar 95,60 persen jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,40 persen. Untuk Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-8**  
**Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2021**

NO	SKPD	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEU	FISIK
		Rp	%	Rp	%	%	%	%	%
1	Dinas Pendidikan	1.517.411.045.947	100	1.195.101.774.298	78,76	85,14	95,53	-21,24	10,39
2	Dinas Kesehatan	601.768.183.312	100	480.873.176.423	79,91	92,40	93,08	-20,09	0,68
3	Rumah Sakit Umum Daerah	615.540.331.164	100	554.045.067.143	90,01	100	91,47	-9,99	-8,53
4	Dinas Tata Ruang	26.178.752.050	100	23.583.904.802	90,09	100	98,89	-9,91	-1,11
5	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	560.901.366.276	100	508.148.419.994	90,59	96,43	96,43	-9,41	0
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	719.425.709.726	100	610.824.373.657	84,90	99,97	92	-15,1	-7,97
7	Satuan Polisi Pamong Praja	92.556.641.140	100	84.765.656.847	91,58	100	100	-8,42	0
8	Dinas Pemadam Kebakaran	78.624.934.300	100	72.628.809.299	92,37	99,37	99,71	-7,63	0,34
9	Dinas Sosial	22.319.326.600	100	19.719.547.014	88,35	99,10	95,18	-11,65	-3,92
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.756.110.000	100	8.532.359.239	87,46	100	87,47	-12,54	-12,53
11	Dinas Tenaga Kerja	17.466.804.550	100	16.027.170.306	91,76	100	99,98	-8,24	-0,02
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.692.580.100	100	11.840.364.035	93,29	98,82	100	-6,71	1,18
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	26.703.990.956	100	24.225.220.851	90,72	99,83	98,39	-9,28	-1,45
14	Dinas Lingkungan Hidup	355.945.205.600	100	320.320.859.293	89,99	99,43	99,72	-10,01	0,29
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	33.420.070.740	100	31.247.333.547	93,50	98,45	100	-6,5	1,55
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20.312.915.450	100	18.219.175.795	89,69	77,22	91,01	-10,31	13,79
17	Dinas Perhubungan	102.591.647.400	100	95.205.702.619	92,80	100	99,41	-7,2	-0,59
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Serta Persandian	29.930.347.940	100	27.592.651.075	92,19	99,81	99,30	-7,81	-0,51
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.804.000.050	100	11.164.484.081	87,20	95,31	94,78	-12,8	-0,54
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.559.476.000	100	34.377.703.625	91,53	99,84	99,89	-8,47	0,05
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	49.834.718.761	100	46.324.876.238	92,96	100	100	-7,04	0
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	11.974.568.000	100	10.916.658.883	91,17	100	99,79	-8,83	-0,21
23	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	15.851.568.100	100	14.014.929.177	88,41	100	98,37	-11,59	-1,63
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	29.359.511.500	100	27.872.637.591	94,94	100	100	-5,06	0
25	Sekretariat Daerah	180.395.508.914	100	161.255.445.635	89,39	100	99,62	-10,61	-0,38
26	Inspektorat Kota	38.542.333.514	100	34.536.256.877	89,61	100	99,31	-10,39	-0,69
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	29.419.862.330	100	27.466.795.286	93,36	99,56	100	-6,64	0,44
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	533.375.533.451	100	413.884.340.148	77,60	99,91	97,57	-22,4	-2,34
29	Badan Pendapatan Daerah	158.194.631.137	100	133.413.589.908	84,34	99,91	99,80	-15,66	-0,1
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	22.677.400.704	100	20.678.816.268	91,19	99,74	99,72	-8,81	-0,01
31	Sekretariat DPRD	158.693.568.200	100	111.894.231.196	70,51	99,87	92,77	-29,49	-7,1

NO	SKPD	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEU	FISIK
		Rp	%	Rp	%	%	%	%	%
32	Kecamatan Bekasi Timur	27.522.056.850	100	24.528.911.973	89,12	100	98,60	-10,88	-1,4
33	Kecamatan Bekasi Barat	29.100.202.200	100	25.920.126.613	89,07	100	99,97	-10,93	-0,03
34	Kecamatan Bekasi Utara	36.591.911.300	100	32.995.296.688	90,17	100	96,05	-9,83	-3,95
35	Kecamatan Bekasi Selatan	27.302.546.500	100	24.691.820.714	90,44	100	99,55	-9,56	-0,45
36	Kecamatan Medan Satria	22.819.229.950	100	20.266.132.698	88,81	100	96,87	-11,19	-3,13
37	Kecamatan Rawalumbu	25.714.186.400	100	22.932.213.566	89,18	100	91,10	-10,82	-8,9
38	Kecamatan Bantargebang	18.212.105.800	100	16.508.692.716	90,65	100	96,77	-9,35	-3,23
39	Kecamatan Mustika Jaya	24.282.605.400	100	21.803.856.027	89,79	100	100	-10,21	0
40	Kecamatan Jatiasih	29.895.540.600	100	26.756.606.441	89,50	99,92	98,55	-10,5	-1,37
41	Kecamatan Pondokgede	25.717.875.300	100	22.652.436.935	88,08	100	96,74	-11,92	-3,26
42	Kecamatan Jatisampurna	23.907.068.200	100	20.631.952.954	86,30	100	86,49	-13,7	-13,51
43	Kecamatan Pondok Melati	19.880.583.500	100	17.538.164.069	88,22	100	97,69	-11,78	-2,31
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.440.334.950	100	15.642.882.922	95,15	100	99,95	-4,85	-0,05
<b>TOTAL</b>		<b>6.449.614.890.862</b>	<b>100</b>	<b>5.443.571.425.466</b>	<b>84,40</b>	<b>95,33</b>	<b>95,60</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,27</b>

Sumber: Data Simpelbang, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021

2. Komponen yang kedua adalah persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan, dimana dari 3420 paket pekerjaan yang terdaftar di aplikasi SIRUP yang terdiri dari 403 paket tender dan 3017 paket pengadaan elektronik (e-PL) yang ada di kota Bekasi kesemuanya difasilitasi oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Komponen ketiga yaitu indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan, dimana atas dasar survey kepuasan masyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu Januari-Desember 2021 nilai yang didapatkan oleh unit layanan Publik PBJ adalah 91,45 atau dengan kategori sangat baik.

Dari ketiga komponen tersebut didapatkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$(95,60 \times 80\%) + \left\{ \left[ \left( \frac{403 + 3017}{3420} \times 40\% \right) + (91,45) \times 60\% \right] \times 30\% \right\}$$

sehingga didapatkan hasil sebesar 87,53 persen.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan maupun via media sosial, dimana didalam kegiatan tersebut PPTK di dorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
2. Melakukan kegiatan pengendalian fisik konstruksi;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi terjadwal dengan perangkat daerah terkait pengisian RUP baik secara langsung maupun secara virtual melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar memudahkan perangkat daerah dalam entri data RUP pada SIRUP;
4. Untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian dan Lembaga terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam

mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa; dan

- Melakukan koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah terkait kelengkapan dokumen pengadaan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- Adanya pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar keluaran kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah di rencanakan harus dialihkan untuk penanganan COVID-19;
- Pembatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakannya adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);
- Masih kurangnya pemahaman pelaku pengadaan barang/jasa sehingga seringkali menimbulkan kekeliruan dalam penginputan data dalam SIRUP.

Namun walaupun dengan adanya faktor yang menghambat, namun target kinerja indikator saaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat tercapai.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Perekonomian Dan Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-9**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Pembangunan	Persen	100	100	100
2.	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, Diolah

Dengan melihat capaian indikator program rata-rata tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan. Capaian indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-10**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Pelaksanaan Pembangunan Target Akhir Renstra**  
**2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	
		2021	2023
<b>Target</b>	Persen	84	88
<b>Realisasi</b>	Persen	87,53	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2021 sebesar 84 Persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 88 persen maka dapat dikatakan target dapat terlampaui. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini bukan berarti tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Faktor penghambat itu antara lain :

1. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena dana dialihkan untuk penanganan covid-19;
2. Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
3. Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
4. Pemahaman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih minim, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam input data SiRUP;
5. OPD tidak konsisten dalam melakukan revisi dokumen pengadaan apabila ada kesalahan atau kurangnya persyaratan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan waktu pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat.

untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Daerah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi hambatan, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang

- harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
  - c. Adanya aplikasi SIMPELBANG yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung. Hal ini dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
  - e. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa;
  - f. Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-11**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.692.456.800	4.763.577.806	68,215	99,275	31,06
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.602.418.800	4.293.255.350	93,28		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.000.000	147.645.500	98,43		

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.302.418.800	4.004.039.850	93,06		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	150.000.000	141.570.000	94,38		
		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.090.038.000</b>	<b>470.322.456</b>	<b>43,15</b>		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	628.920.000	189.472.456	30,13		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	321.818.000	188.900.000	58,70		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.300.000	91.950.000	66,01		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 5.692.456.800,00 (*lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 4.763.577.806,00 (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam ribu Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pelaksanaan Pembangunan hanya mencapai 68,215 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan sebesar 87,53 persen dari target nilai sebesar 84 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 102,75 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 68,215 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 31,06 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

**Tabel 0-12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2020 Dengan Tahun 2021 Untuk untuk Indikator Kinerja**  
**Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2020	2021
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Persen	n/a	87,53

Sumber : Data Bagian Tata Usaha, diolah

Capaian indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan tahun 2021 belum dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan baru efektif digunakan pada tahun 2021 setelah penetapan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

### **3. Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi.**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Desentralisasi Fiskal, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah diantaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh Wilayah tersebut.

Dengan demikian, pemerintah daerah tentunya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing yang tinggi untuk mengkombinasikan antara faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya

manusia dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk lebih berkembang dan berdaya saing.

Semenjak undang-undang tentang otonomi daerah tersebut diterapkan, persoalan kemampuan daerah secara ekonomi dan politis mulai menjadi sorotan. Salah satu isu ekonomi yang menarik adalah seputar daya dukung sumber pendapatan daerah dalam menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Isu ini memang strategis mengingat pelaksanaan otonomi juga dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dari sisi pembiayaan pembangunan. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian BUMD sebagai

Dalam upaya untuk menggali potensi guna memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, pemerintah Kota Bekasi telah memiliki beberapa BUMD diantaranya adalah Perumda Air Minum Tirta Patriot, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, PT. (perseroda) Sinergi Patriot Kota Bekasi, PD Mitra Patriot, PD Migas Kota Bekasi dan PT. (Perseroan Daerah) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi, dimana tujuan penting BUMD tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemegang saham utama berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja BUMD melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan termasuk menilai tingkat kesehatan BUMD, Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggunakan Formulasi penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah yang tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. Formulasi ini digunakan untuk melakukan penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Formulasi ini disusun

dengan menggunakan metode Balance Score Card. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMD, yang meliputi penilaian:

- a. Aspek Keuangan diambil berdasarkan indikator dalam perspektif keuangan;
- b. Aspek Operasional diambil berdasarkan indikator dalam perspektif pelanggan, bisnis proses, serta *learning and growth*; dan
- c. Aspek Administrasi.

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan terhadap ketiga aspek tersebut Didapatkan hasil sebagaimana berikut:

**Tabel 0-13**  
**Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Kota Bekasi**

No	BUMD	Skor	Predikat	Kategori
1	PDAM Tirta Bhagasasi	70,50	Sehat	A
2	PDAM Tirta Patriot	68,50	Sehat	A
3	PT. (Perseroda) Sinergi Patriot	47,00	Kurang Sehat	BB
4	PT. (Perseroda) BPRS Syariah Patriot	70,50	Sehat	AA
5	PD Migas Kota Bekasi	14,00	Tidak Sehat	CC
6	PD Mitra Patriot Bekasi	46,00	Kurang Sehat	BB

Sumber : Laporan Evaluasi BUMD tahun 2020, Bagian Perekonomian

Dengan demikian pada tahun 2021 sebanyak 6 BUMD dari 6 BUMD di Kota Bekasi mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi dapat dilihat sebagaimana berikut :

**Tabel 0-14**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	persen	100	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian tahun 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 100 Persen BUMD yang dibina dan diawasi, sementara

realisasi tercapai 100 Persen maka capaian kinerja tahun 2021 atas Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi 100 persen, maka capaian Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada Tahun 2021 berhasil mencapai target target.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 karena bagian perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan:

1. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
2. menyusun pedoman pelaksanaan operasional BUMD;
3. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris;
4. mengadakan pertemuan secara periodik dengan Pengurus BUMD (Direksi, Badan Pengawas, Komisaris) dan pejabat yang berwenang;
5. penataan strategi usaha agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik;
6. Pengawasan dan Pengendalian dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis pembinaan BUMD dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional BUMD.

Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim sehingga tantangan yang dihadapi sekretariat daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan antara lain :

- a. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- b. Marketing system yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah;
- c. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis;
- d. Kurang berfungsinya Badan Pengawas;
- e. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi Debt to Equity Ratio yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif tinggi;
- f. Kurangnya Inovasi untuk menunjang daya saing yang kuat
- g. Keterbatasan sumber permodalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dari sisi pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya;
- h. Belum tersusunnya regulasi yang lengkap dan memadai berkaitan dengan pemberian pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan BUMD dalam melakukan aksinya guna pemenuhan tuntutan masyarakat;
- i. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD sehingga pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat mengalami keterbatasan;
- j. Daya saing BUMD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dunia bisnis swasta murni. Hal ini sebagai akibat dari kurang fleksibilitasnya aksi korporasi dalam menghadapi persaingan jika dibandingkan dengan bisnis swasta;
- k. Aset perusahaan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat dari regulasi maupun dari kemampuan SDM BUMD itu sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga mengurangi tingkat keuntungan.

Sehingga untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Restrukturisasi dan optimalisasi BUMD;
- b. Penguatan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
- c. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan BUMD;
- d. Ekspansi dan Diversifikasi Usaha;
- e. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- f. Perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD
- g. Evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) kesemua BUMD secara rutin oleh Pembina BUMD yang dilakukan minimal setahun dua kali, untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) dalam sistem tata kelola manajemen perusahaan dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan Kinerja Unggul (Performance Excellence);
- h. Melakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan dan non keuangan BUMD dalam hibungannya dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kontribusi terhadap PHD;
- i. Menghitung rasio tingkat pengembalian modal atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada BUMD baik secara finansial maupun secara sosial;
- j. Mengidentifikasi dan menyusun kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

**Tabel 0-15**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidang Usaha	5	100%	100%

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
2.	Persentase Peningkatan Deviden BUMD	Persen	1,25	15,92	1273,60

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, Diolah

Dengan melihat capaian 2 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi memenuhi bahkan melampaui target, berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi. Adapun capaian indikator Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi tahun 2021 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-16**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	
		2021	2023
<b>Target</b>	Persen	100	100
<b>Realisasi</b>	Persen	100	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat pada tahun 2021 tercapai 100 persen jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 yang juga sebesar 100 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-17**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi**

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>528.640.000</b>	<b>417.230.000</b>	<b>78,93</b>	100	21,07
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	528.640.000	417.230.000	78,93		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi, dimana pagu anggaran dianggarkan sebesar Rp. 528.640.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran Rp. 417.230.000,00 (*empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau sebesar 78,93% Jika dikaitkan dengan capaian BUMD yang Dibina dan Diawasi mencapai 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka dapat dianggap wajar mengingat tidak ada anggaran yang dialokasikan yang menunjang pencapaian indikator sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat. Walau demikian Sekretariat Daerah akan terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dengan atau tanpa dukungan anggaran yang maksimal.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 0-18**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2020 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja**  
**Sasaran Persentase BUMD dalam kondisi sehat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	Persen	50	66,67

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2020, diolah

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah**

**4. Indikator Sasaran Nilai AKIP SETDA.**

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk merngetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai mana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 80,30 atau predikat “A” dengan intepretasi Memuaskan. Tabel hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 di tunjukan dalam table berikut:

**Tabel 0-19**  
**Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021**

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2021	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	28,49
2	Pengkuran Kinerja	25	20,63
3	Pelaporan Kinerja	15	13,11
4	Evaluasi Internal	10	7,85
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	10,22
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80,30</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas</b>		<b>A</b>

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah, Tahun 2021

Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 0-20**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A	100%

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar nilai A, sementara realisasi mencapai nilai A maka capaian kinerja tahun 2021 atas Nilai AKIP SETDA sebesar 100 persen, maka capaian Nilai AKIP SETDA pada Tahun 2021 telah tercapai.

Adapun perbandingan perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 0-21**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi**

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL	
		NILAI	TINGKAT AKUNTABILITAS
1	SETDA	80,30	A
2	SETWAN	69,56	B
3	ITKO	84,32	A
4	BAPENDA	78,40	BB
5	BAPPELITBANGDA	81,94	A
6	BKPPD	80,04	A
7	BPBD	42,39	C
8	BPKAD	84,13	A
9	DINAS DAMKAR	74,25	BB
10	DBMSDA	79,90	BB
11	DISARPUSDA	79,17	BB
12	DINKES	80,64	A
13	DINSOS	77,10	BB
14	DINAS LH	77,87	BB
15	DISDAGPERIN	71,86	BB
16	DISDIK	76,46	BB
17	DISHUB	78,19	BB
18	DKPPP	73,34	BB
19	DISKOMINFO	76,06	BB
20	DISKOPUKM	75,48	BB

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL	
		NILAI	TINGKAT AKUNTABILITAS
21	DISNAKER	62,48	B
22	DISPARBUD	75,18	BB
23	DISPERKIMTAN	79,23	BB
24	DISPORA	75,06	BB
25	DISTARU	79,75	BB
26	DP3A	75,37	BB
27	DPMPSTP	84,47	A
28	DPPKB	74,93	BB
29	DISDUKCAPIL	78,69	BB
30	KEC.BANTARGEBAWANG	74,07	BB
31	KEC. BEKASI BARAT	73,36	BB
32	KEC. BEKASI SELATAN	76,03	BB
33	KEC.BEKASI TIMUR	74,11	BB
34	KEC. BEKASI UTARA	74,11	BB
35	KEC.JATIASIH	77,18	BB
36	KEC.JATISAMPURNA	74,01	BB
37	KEC.MEDANSATRIA	75,99	BB
38	KEC.MUSTIKAJAYA	75,03	BB
39	KEC.PONDOKGEDE	75,21	BB
40	KEC. PONDOKMELATI	75,07	BB
41	KEC. RAWALUMBU	75,36	BB
42	BADAN KESBANGPOL	74,81	BB
43	RSUD	84,51	A
44	SATPOL PP	79,15	BB

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020, Diolah

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP SETDA ini dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja Untuk memastikan kolaborasi kinerja antara Sekretariat Daerah dengan perangkat-perangkat daerah terkait.
- b. Menyempurnakan Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
- c. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu serta sistem pengukuran kinerja individu;

- d. Memanfaatkan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA sehingga dapat mencapai target karena didukung oleh indikator capaian program sebagai berikut:

**Tabel 0-22**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	50	93,18	186,36
2.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
3.	persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	Persen	100	100	100
4.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, Diolah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA didukung oleh 4 (empat) indikator program dengan rata-rata capaian program sebesar 121,59 persen maka keberhasilan ini maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA. Capaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA jika dikaitkan

dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-23**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA terhadap Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP SETDA	
		2021	2023
<b>Target</b>	Persen	A	A
<b>Realisasi</b>	Persen	100	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP SETDA pada tahun 2021 sudah tercapai sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 yaitu nilai A, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan target kinerja yang sepenuhnya didasarkan atas basis data yang memadai dan dilengkapi dengan argument dan perhitungan logis
2. Menyusun strategi untuk pencapaian kinerja yang telah di tetapkan agar pencapaian kinerja dapat meningkat.
3. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah di perjanjikan;
2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada setiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-24**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Nilai AKIP SETDA**

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP SETDA	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>722.864.500</b>	<b>520.747.553</b>	<b>72,43</b>	100	27,41
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.864.500	39.011.000	49,9		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	47.432.000	94,86		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000	46.741.250	62,32		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000	146.003.803	58,4		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000	189.507.500	94,75		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	70.000.000	52.052.000	74,36		
		<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>4.602.418.800</b>	<b>4.293.255.350</b>	<b>95,29</b>		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.000.000	147.645.500	98,43		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.302.418.800	4.004.039.850	93,06		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	150.000.000	141.570.000	94,38		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp.5.325.283.300,00 (*Lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.4.814.002.903,00 (*empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ribu Sembilan ratus tiga Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai AKIP SETDA mencapai 90,4 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai AKIP SETDA yaitu nilai A dari nilai A, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,41 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

**Tabel 0-25**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP SETDA**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	BB	A

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2021, Diolah

## 5. Indikator Sasaran Nilai IKM SETDA

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 11 (sebelas) unit layanan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai IKM SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-26**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM SETDA**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81	85,24	105,23%

Sumber: SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Semester II Tahun 2021, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Nilai IKM SETDA pada tahun 2021 sebesar 81 poin, sementara realisasi mencapai 85,24 poin, maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator Nilai IKM SETDA yang sebesar 105,23 persen, maka capaian indikator Nilai IKM SETDA pada Tahun 2021 telah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021 terhadap 11 Unit layanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah, sebanyak 9 unit layanan publik (81,8%) mempunyai nilai IKM baik dan 2 unit layanan publik (18,1%) mempunyai nilai SKM Sangat baik. Untuk melihat nilai hasil survey

kepuasan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-27**  
**Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada**  
**Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

NO	UNSUR PELAYANAN/ BAGIAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Tata Usaha	83,20	Baik
2	Organisasi	82,56	Baik
3	Pembangunan	86,09	Baik
4	Perekonomian	89,38	Sangat Baik
5	Tata Pemerintahan	88,38	Baik
6	Hukum	82,75	Baik
7	Pengadaan Barang dan Jasa	91,45	Sangat Baik
8	Perlengkapan	81,75	Baik
9	Hubungan Masyarakat	85,89	Baik
10	Kesejahteraan Sosial	82,68	Baik
11	Kerjasama	88,04	Baik
<b>Nilai Rata-rata Capaian SKM</b> <b>Sekretariat Daerah Kota Bekasi</b>		<b>85,24</b>	<b>Baik</b>

Sumber : SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Semester II

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari petugas pelayanan dari dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi;
2. Asistensi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat juga difasilitasi melalui Grup Whatsapp. Dengan adanya Grup Whatsapp, seluruh peserta mendapat arahan teknis tentang pelaksanaan survey dengan lebih cepat serta progress yang dicapai sesuai tahapan survey dapat dipantau oleh Bagian Organisasi;
3. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala dan intensif oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;
4. Evaluasi secara berkala terhadap hasil survey kepuasan masyarakat.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai IKM SETDA pada Sekretariat Daerah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-28**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai IKM SETDA**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
2.	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100	100	100
4.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100
5.	Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	Persen	100	75	75
6.	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, Diolah

Dengan melihat capaian indikator program rata-rata tercapai kecuali untuk indikator Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya yang hanya tercapai 75 persen dimana ini sebagai dampak dari wabah pandemi covid-19 dimana penyelenggaraan event yang mengumpulkan masa sangat dibatasi, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA. Capaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-29**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai IKM SETDA Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2021	2023
<b>Target</b>	Nilai	81	83
<b>Realisasi</b>	Nilai	85,24	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai IKM SETDA pada tahun 2021 sebesar 85,24 poin dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 83,00 poin, maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya

ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Sekretariat Daerah untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- g. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di Sekretariat Daerah memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- h. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- i. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).
- j. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala dan intensif dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi dan memperbaiki layanan dimulai dengan indeks layanan terendah.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM SETDA Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-30**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Nilai IKM SETDA**

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai AKIP SETDA		30.145.503.000	25.612.464.065	65,99	99,35	33,36
		<b>Program Administrasi Umum</b>	4.950.000.000	3.687.687.500	87,68		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	47.432.000	94,86		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000	189.507.500	94,75		

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.700.000.000	3.450.748.000	73,42		
		<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>24.105.465.000</b>	<b>21.454.454.109</b>	<b>58,695</b>		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	399.280.000	102.280.000	25,62		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	62.548.000	26.585.600	42,5		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.643.637.000	18.407.693.509	93,71		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.000.000.000	2.917.895.000	72,95		
		<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>1.090.038.000</b>	<b>470.322.456</b>	<b>51,613</b>		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	628.920.000	189.472.456	30,13		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	321.818.000	188.900.000	58,7		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.300.000	91.950.000	66,01		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program dan 10 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai IKM SETDA, dimana pagu anggaran sebesar Rp.30.145.503.000,00 (*Tiga puluh milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.25.612.464.065,00 (*Dua puluh lima milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM mencapai 65,99 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Nilai IKM sebesar 85,24 poin dari target nilai sebesar 81 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 105,23 persen, sementara serapan anggaran hanya sebesar 65,99 Persen, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 33,36

persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran yang cukup besar, tetapi *capaian* kinerja dapat melampaui target.

**Tabel 0-31**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2021 Untuk untuk Indikator Kinerja Nilai IKM SETDA**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2020	2021
1	Nilai IKM Setda	Nilai	83,37	85,24

Sumber : Data hasil SKM Setda tahun 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA terdapat kenaikan capaian kinerja dari 83,37 pada tahun 2020 menjadi 85,24 pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar 1,87. Indikator kinerja sasaran Nilai IKM SETDA dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk mendongkrak menerapkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah untuk mencapai kinerja penerapan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 0-32**  
**Perbandingan IKM Setda Semester II dengan OPD lain**

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Badan Pendapatan Daerah	78.25	Baik
2	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	77.94	Baik
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86.91	Baik
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	87.55	Baik
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.43	Baik
6	Dinas Pendidikan	82.23	Baik
7	Dinas Kesehatan	80.70	Baik
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.10	Baik
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	82.36	Baik
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	84.48	Baik
11	Dinas Lingkungan Hidup	78.44	Baik
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	84.36	Baik
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.75	Baik
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88.57	Sangat Baik
15	Dinas Tenaga Kerja	86.24	Baik

<b>NO</b>	<b>UNIT PELAYANAN</b>	<b>NILAI IKM</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	84.45	Baik
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.52	Baik
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	91.57	Sangat Baik
19	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	88.86	Sangat Baik
20	Dinas Tata Ruang	79.85	Baik
21	Dinas Perhubungan	82.50	Baik
22	Dinas Pemadam Kebakaran	81.90	Baik
23	Dinas Sosial	81.05	Baik
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	76.93	Baik
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	79.37	Baik
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85.93	Baik
27	RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid	80.82	Baik
28	Inspektorat Daerah	80.56	Baik
29	Sekretariat Daerah	85.24	Baik
30	Sekretariat DPRD	85.59	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	84.30	Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.89	Baik
33	Kecamatan Bekasi Barat	82.50	Baik
34	Kecamatan Bekasi Selatan	81.16	Baik
35	Kecamatan Bekasi Utara	82.60	Baik
36	Kecamatan Bekasi Timur	83.26	Baik
37	Kecamatan Medansatria	82.59	Baik
38	Kecamatan Mustikajaya	82.50	Baik
39	Kecamatan Rawalumbu	86.18	Baik
40	Kecamatan Bantargebang	86.60	Baik
41	Kecamatan Jatisampurna	85.42	Baik
42	Kecamatan Jatiasih	83.29	Baik
43	Kecamatan Pondokmelati	87.66	Baik
44	Kecamatan Pondokgede	83.68	Baik
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	92.95	Sangat Baik
46	RSUD Kelas D Bantargebang	89.08	Sangat Baik
47	RSUD Kelas D Pondokgede	97.79	Sangat Baik
48	Puskesmas Seroja	80.65	Baik
49	Puskesmas Kaliabang Tengah	85.51	Baik
50	Puskesmas Teluk Pucung	82.76	Baik
51	Puskesmas Pejuang	82.82	Baik
52	Puskesmas Kotabaru	83.89	Baik
53	Puskesmas Bintara	87.67	Baik
54	Puskesmas Bintarajaya	88.30	Baik
55	Puskesmas Kranji	84.54	Baik
56	Puskesmas Rawatembaga	88.10	Baik
57	Puskesmas Margamulya	80.17	Baik
58	Puskesmas Margajaya	79.61	Baik
59	Puskesmas Pekayonjaya	82.57	Baik

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
60	Puskesmas Jakamulya	80.67	Baik
61	Puskesmas Karangkitri	80.51	Baik
62	Puskesmas Bojong Rawalumbu	81.86	Baik
63	Puskesmas Pengasinan	82.91	Baik
64	Puskesmas Arenjaya	87.05	Baik
65	Puskesmas Bekasi Jaya	83.29	Baik
66	Puskesmas Pondokgede	78.02	Baik
67	Puskesmas Jatirahayu	80.80	Baik
68	Puskesmas Jatiwarna	85.95	Baik
69	Puskesmas Jatimakmur	84.14	Baik
70	Puskesmas Jatibening	83.75	Baik
71	Puskesmas Jatisampurna	80.81	Baik
72	Puskesmas Jatiasih	83.36	Baik
73	Puskesmas Jatiluhur	81.13	Baik
74	Puskesmas Bantargebang	79.77	Baik
75	Puskesmas Bojongmenteng	85.80	Baik
76	Puskesmas Durenjaya	85.28	Baik
77	Puskesmas Mustikajaya	81.50	Baik
78	Puskesmas Harapan Baru	82.17	Baik
79	Puskesmas Padurenan	82.06	Baik
80	Puskesmas Perwira	78.30	Baik
81	Puskesmas Jatiranggon	78.94	Baik
82	Puskesmas Cimuning	81.76	Baik
83	Puskesmas Kalibaru	83.67	Baik
84	Puskesmas Jakasetia	79.99	Baik
85	Puskesmas Perumnas II	78.52	Baik
86	Puskesmas Sumurbatu	94.35	Sangat Baik
87	Puskesmas Mustikasari	81.86	Baik
88	Puskesmas Ciketing Udik	86.07	Baik
89	Puskesmas Jatibening Baru	82.85	Baik
	<b>Nilai rata-rata capaian IKM Kota Bekasi</b>	<b>83.60</b>	<b>Baik</b>

## 6. Indikator Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

Indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas

atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah Maka Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Adapun capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas diukur dari perbandingan antara perangkat daerah dengan nilai AKIP A dengan nilai AKIP seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 0-33**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	persen	11,36	18,18	160,05

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 11,36 Persen, sementara realisasi mencapai 18,18 Persen

maka capaian kinerja tahun 2021 atas Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 160,05 persen, maka capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada Tahun 2019 telah terlampaui. Dengan demikian pada tahun 2019 sebanyak 8 perangkat daerah di Kota Bekasi telah mendapatkan nilai AKIP A.

Adapun rekapitulasi perbandingan perolehan Nilai AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Tahun 2020 dengan 2021 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 0-34**  
**Rekapitulasi Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 dan 2021 Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi**

NO	PERANGKAT DAERAH	2020		2021	
		NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	RSUD	88,41	A	84,51	A
2	DPMPTSP	83,63	A	84,47	A
3	INSPEKTORAT	84,18	A	84,32	A
4	BPKAD	85,37	A	84,13	A
5	BAPPELITBANGDA	81,47	A	81,94	A
6	DINKES	80,61	A	80,64	A
7	SETDA	79,65	BB	80,30	A
8	BKPPD	78,52	BB	80,04	A
9	DBMSDA	77,12	BB	79,90	BB
10	DISTARU	78,58	BB	79,75	BB
11	DISPERKIMTAN	78,42	BB	79,23	BB
12	DISARPUSDA	78,10	BB	79,17	BB
13	SATPOL PP	75,51	BB	79,15	BB
14	DISDUKCAPIL	78,23	BB	78,69	BB
15	BAPENDA	79,88	BB	78,40	BB
16	DISHUB	78,59	BB	78,19	BB
17	DINAS LH	76,24	BB	77,87	BB
18	KEC.JATIASIH	77,2	BB	77,18	BB
19	DINSOS	77,10	BB	77,10	BB
20	DISDIK	78,12	BB	76,46	BB
21	DISKOMINFOSTANDI	78,08	BB	76,06	BB
22	KEC. BEKASI SELATAN	76,02	BB	76,03	BB
23	KEC.MEDANSATRIA	75,69	BB	75,99	BB
24	DISKOPUKM	74,84	BB	75,48	BB
25	DP3A	74,39	BB	75,37	BB
26	KEC.JATISAMPURNA	74,01	BB	74,01	BB

NO	PERANGKAT DAERAH	2020		2021	
		NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
27	KEC. RAWALUMBU	73,43	BB	75,36	BB
28	KEC.PONDOKGEDE	74,71	BB	75,21	BB
29	DISPARBUD	72,28	BB	75,18	BB
30	KEC. PONDOKMELATI	73,33	BB	75,07	BB
31	DISPORA	74,56	BB	75,06	BB
32	KEC.MUSTIKAJAYA	75,22	BB	75,03	BB
33	DPPKB	73,08	BB	74,93	BB
34	BADAN KESBANGPOL	76,27	BB	74,81	BB
35	DINAS DAMKAR	72,26	BB	74,25	BB
36	KEC. BEKASI UTARA	72,51	BB	74,11	BB
37	KEC.BEKASI TIMUR	74,81	BB	74,11	BB
38	KEC. BEKASI BARAT	72,26	BB	73,36	BB
39	DKPPP	65,70	BB	73,34	BB
40	KEC.BANTARGEBAWANG	75,55	BB	74,07	BB
41	DISDAGPERIN	73,43	BB	71,86	BB
42	SETWAN	77,23	BB	69,56	B
43	DISNAKER	77,11	B	62,48	B
44	BPBD	72,41	BB	42,39	C

Sumber : Data LHE Inspektorat Terhadap SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020 dan 2021, Diolah

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada tahun 2021 ini dapat meningkatkan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana hanya 6 perangkat daerah yang mendapatkan nilai AKIP A. Pada tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) dimana capaian kinerja pada saat itu adalah 100 persen atau seluruh perangkat daerah sudah mencapai nilai minimal B sehingga pada Renstra Perubahan dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian kinerja sehingga ditetapkan indikator baru yaitu Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas (Kategori "A"). perbaikan atas perumusan indikator kinerja ini perlu dilakukan agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi telah menindaklanjuti

rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mereviu dokumen perencanaan, serta melakukan perbaikan atas perumusan indicator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, sesuai level jabatan dan memenuhi kriteria SMART;
- b. Mereviu keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
- c. Merumuskan program prioritas daerah untuk menyelesaikan isi strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar daerah;
- d. Mereviu peta proses bisnis dengan membangun struktur kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja yang diharapkan untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;
- e. Melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level;
- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- g. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja melalui pemanfaatan

- teknologi informasi, penilaian kinerja periodik, serta mekanisme *reward and punishment*;
- h. Mengoptimalkan kolaborasi antar perangkat daerah pengampu akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan akuntabilitas lebih cepat, tepat dan terarah;
  - i. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sehingga melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif sebagai berikut:

**Tabel 0-35**  
**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi**  
**Birokrasi**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	50	93,18	186,36

Sumber: Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, Diolah

Ketercapaian atas indikator program Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebagaimana tabel diatas, dimana capaian kinerja tahun 2021 terlampaui sebesar 186,36 persen. Capaian kinerja program Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah dicapai dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang memiliki pemahaman SAKIP dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Ketercapaian ini berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas. Ketercapaian atas indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas ini juga akan mendorong kepada

peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 0-36**  
**Perkembangan Nilai AKIP Kota Bekasi**

No	Indikator	2018	2019	2020
1.	Nilai AKIP Kota Bekasi	63,49	66,28	67,07

Sumber : Hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018-2020 Kemenpan RB

dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai AKIP Kota Bekasi tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kami optimis bahwa nilai AKIP Kota Bekasi tahun-tahun selanjutnya akan mendapatkan peningkatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bekasi melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan, Mereviu keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan serta merumuskan program prioritas daerah untuk menyelesaikan isi strategis daerah melalui perubahan terhadap RPJMD Tahun 2021 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 kemudian di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Dilakukan reviu Cascade Indikator Kinerja Individu dimana dipetakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab eselon II, III, IV dan Pelaksana, dimana indikator kinerja individu tersebut di sinkronkan dengan sasaran kinerja pegawai dan menjadi ukuran dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Dengan

demikian setiap individu pegawai memiliki kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023

3. Pemerintah Kota Bekasi telah menintegrasikan 6 (enam) Aplikasi kinerja yang terdiri dari SIENCANG (Perencanaan/Bappelitbangda), SIMDA (Keuangan/BPKAD), e-MONEV (Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/Bappelitbangda), SIMPELBANG (Monev Tepra/ Bagian Pembangunan SETDA), e-SAKIP (SAKIP/ Bagian Tata Pemerintahan SETDA) dan SIKERJA (Kinerja Harian Pegawai/ BKPPD) dimana keenam aplikasi tersebut akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kinerja perangkat daerah dan individu pegawai dalam mencapai indikator RPJMD dan Renstra.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, baik pada level Perangkat Daerah, level Inspektorat Daerah hingga Bappelitabangda. Pada level Perangkat Daerah dikembangkan budaya kontrol tiap level dengan melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terkait capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi. Pada level Inspektorat titik berat evaluasi bukan hanya pada aspek asses tetapi lebih kepada asist agar kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah menjadi lebih baik lagi. Pada level Bappelitbangda pola perencanaan bukan hanya didasarkan pada tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, tetapi juga memperhatikan capaian kinerja sesuai dengan laporan kinerja yang telah dibuat perangkat daerah dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

Adapun urutan peringkat nilai AKIP daerah regional Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-37**  
**Peringkat Nilai AKIP Daerah Regional Jawa Barat**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	Kabupaten Garus	Provinsi Jawa Barat	3.8943	Tinggi
2	Kota Banjar	Provinsi Jawa Barat	3.8289	Tinggi
3	Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat	3.7369	Tinggi
4	Kabupaten Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat	3.7304	Tinggi
5	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	3.7064	Tinggi
6	Kabupaten Purwakarta	Provinsi Jawa Barat	3.6892	Tinggi
7	Kabupaten Subang	Provinsi Jawa Barat	3.6872	Tinggi
8	Kota Cirebon	Provinsi Jawa Barat	3.6832	Tinggi
9	Kabupaten Indramayu	Provinsi Jawa Barat	3.6832	Tinggi
10	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat	3.6812	Tinggi
11	Kabupaten Sumedang	Provinsi Jawa Barat	3.6480	Tinggi
12	Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat	3.6298	Tinggi
13	Kota Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	3.6255	Tinggi
14	Kabupaten bogor	Provinsi Jawa Barat	3.6169	Tinggi
15	Kabupaten Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	3.6123	Tinggi
16	Kabupaten Majalengka	Provinsi Jawa Barat	3.6121	Tinggi
17	Kabupaten Kuningan	Provinsi Jawa Barat	3.6029	Tinggi
18	Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat	3.5744	Tinggi
19	Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat	3.5722	Tinggi
20	Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat	3.5713	Tinggi
21	Kabupaten Pangandaran	Provinsi Jawa Barat	3.5284	Tinggi
22	Kota Bogor	Provinsi Jawa Barat	3.5046	Tinggi
23	Kabupaten Ciamis	Provinsi Jawa Barat	3.4730	Tinggi
24	Kota Depok	Provinsi Jawa Barat	4.4575	Tinggi
25	Kabupaten Cirebon	Provinsi Jawa Barat	3.3707	Tinggi
26	Kabupaten Cianjur	Provinsi Jawa Barat	3.3463	Tinggi
27	Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat	6.2314	Tinggi

Sumber : Hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 Kemenpan RB

Capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas tahun 2021 bila dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 0-38**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terhadap**  
**Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	
		2021	2023
<b>Target</b>	Persen	11,36	22,73
<b>Realisasi</b>	Persen	18,18	-

Sumber: Data Olahan Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas Pada tahun 2021 tercapai sebesar 18,18 persen jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 22,73 persen, maka kedepan Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus meningkatkan target kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 0-39**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>77.864.500</b>	<b>38.853.500</b>	<b>49,90</b>	<b>100</b>	<b>50,1</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.864.500	38.853.500	49,90		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas, dimana

pagu anggaran sebesar Rp. 77.864.500,00 (*Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 38.853.500,00 (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas hanya mencapai 49,90 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 18,18 persen dari target sebesar 11,36 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 160,05 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 50,1 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi *capaian* kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Sekretariat Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

**Tabel 0-40**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2020	2021
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	Persen	100	18,18

Sumber : Data Bagian Tata Pemerintahan Setda tahun 2020, diolah

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2020 Untuk untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas terlihat menurun ini disebabkan karena adanya perubahan target kinerja pada Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah 2018-2023 sebagai tindak lanjut atas rencana tindak perbaikan LKIP tahun 2020 dimana target Renstra tahun 2023 sudah terlampaui pada tahun 2020 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bekasi harus meningkatkan target kinerja dengan mengajukan perubahan target pada indikator program di RPJMD dan Target Indikator Sasaran di Renstra. Perubahan dilakukan terhadap target kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas dari yang semula Persentase OPD yang menerapkan

SAKIP Berkualitas (Kategori B Keatas) menjadi Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas (Kategori A), sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 0-41**  
**Perubahan Target kinerja Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	<b>Sebelum Perubahan</b>							
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas (Kategori B Keatas)	Persen	Target	32	45	57	70	83
			Persen	Capaian	100	100	-	-	-
		<b>Setelah Perubahan</b>							
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas (Kategori A)	Persen	Target	-	-	11.36	15.90	22.73
			Persen	Capaian	-	-	18,18	-	-

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Anggaran tahun 2021 sebelum perubahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 190,610,302,856,- yang kemudian terkoreksi pada penetapan APBD Perubahan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 180,395,508,914 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 0-42**  
**Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Per Program Tahun 2020**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	Program Administrasi Umum	158,034,686,056	144,296,518,614
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	27,470,616,800	29,427,893,500
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	5,105,000,000	6,671,096,800
	<b>TOTAL</b>	<b>190,610,302,856</b>	<b>180,395,508,914</b>

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD Kemendagri tahun 2021, diolah

Total anggaran Sekretariat Daerah berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 180,395,508,914,- dengan realisasi

sebesar Rp. 161,255,445,635,- (89,39%), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 0-43**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi**  
**Setelah P-APBD Per Program Tahun 2021**

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Administrasi Umum	144,296,518,614	129,289,606,985	89.60
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29,427,893,500	26,380,470,844	89.64
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6,671,096,800	5,585,367,806	83.72
	<b>TOTAL</b>	<b>180,395,508,914</b>	<b>161,255,445,635</b>	<b>89.39</b>

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021

Penyerapan anggaran sebesar 89,39% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya perubahan pola pelaksanaan kegiatan sebagai dampak adanya covid 19 yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi daring; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

**Tabel 0-44**  
**Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021**

URAIAN	ANGGARAN		
	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>49,215,313,000</b>	<b>47,165,313,000</b>	<b>(2,050,000,000)</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49,140,313,000	47,090,313,000	(2,050,000,000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75,000,000	75,000,000	-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>350,000,000</b>	<b>110,410,000</b>	<b>(239,590,000)</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	30,450,000	(69,550,000)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	250,000,000	79,960,000	(170,040,000)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>500,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>(300,000,000)</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	400,000,000		(400,000,000)

URAIAN	ANGGARAN		
	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200,000,000	<b>200,000,000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000		<b>(100,000,000)</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6,752,375,000</b>	<b>6,452,877,400</b>	<b>(299,497,600)</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000	150,000,000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150,000,000		<b>(150,000,000)</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,200,000,000	3,761,360,000	<b>561,360,000</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350,000,000	350,000,000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155,000,000	100,000,000	<b>(55,000,000)</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	444,142,400	<b>(55,857,600)</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,172,375,000	1,572,375,000	<b>(600,000,000)</b>
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000,000	75,000,000	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21,150,000,000</b>	<b>18,993,292,095</b>	<b>(2,156,707,905)</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,650,000,000	6,805,000,000	<b>(1,845,000,000)</b>
Pengadaan Mebel	6,750,000,000	5,372,004,595	<b>(1,377,995,405)</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,750,000,000	6,816,287,500	<b>1,066,287,500</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20,863,894,000</b>	<b>19,536,826,000</b>	<b>(1,327,068,000)</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000		<b>(5,000,000)</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,000,000,000	5,200,000,000	<b>(1,800,000,000)</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,183,650,000	1,183,650,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,675,244,000	13,153,176,000	<b>477,932,000</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>29,192,340,000</b>	<b>33,237,039,000</b>	<b>4,044,699,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,427,340,000	1,427,340,000	-
Pemeliharaan Mebel	350,000,000	350,000,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,265,000,000	30,309,699,000	<b>4,044,699,000</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,150,000,000	1,150,000,000	-
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>7,435,787,000</b>	<b>7,494,186,619</b>	<b>58,399,619</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,238,650,000	3,238,650,000	-
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	344,400,000	344,400,000	-
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50,000,000	50,000,000	-
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,802,737,000	3,861,136,619	<b>58,399,619</b>
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>14,324,977,056</b>	<b>3,458,710,000</b>	<b>(10,866,267,056)</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	790,220,000	790,220,000	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	996,220,000	996,220,000	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12,538,537,056	1,672,270,000	<b>(10,866,267,056)</b>

URAIAN	ANGGARAN		
	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>597,864,500</b>	<b>(402,135,500)</b>
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	500,000,000	250,000,000	(250,000,000)
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200,000,000	200,000,000	-
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100,000,000	70,000,000	(30,000,000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200,000,000	77,864,500	(122,135,500)
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>(200,000,000)</b>
Fasilitasi Keprotokolan	400,000,000	400,000,000	-
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2,100,000,000	1,900,000,000	(200,000,000)
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4,700,000,000	4,700,000,000	-
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>5,421,211,000</b>	<b>4,355,538,500</b>	<b>(1,065,672,500)</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	300,000,000		(300,000,000)
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi	4,671,211,000	4,190,526,000	(480,685,000)
Pelaksanaan Otonomi Daerah	450,000,000	165,012,500	(284,987,500)
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>20,119,405,800</b>	<b>23,643,637,000</b>	<b>3,524,231,200</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19,119,405,800	19,643,637,000	524,231,200
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>798,718,000</b>	<b>(401,282,000)</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	500,000,000	336,890,000	(163,110,000)
Fasilitasi Bantuan Hukum	550,000,000	399,280,000	(150,720,000)
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	150,000,000	62,548,000	(87,452,000)
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>730,000,000</b>	<b>630,000,000</b>	<b>(100,000,000)</b>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30,000,000	600,000,000	570,000,000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	700,000,000	30,000,000	(670,000,000)
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>1,115,000,000</b>	<b>978,640,000</b>	<b>(136,360,000)</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	590,000,000	528,640,000	(61,360,000)
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	250,000,000	450,000,000	200,000,000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	275,000,000		(275,000,000)
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>2,390,000,000</b>	<b>4,602,418,800</b>	<b>2,212,418,800</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150,000,000	150,000,000	-
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2,090,000,000	4,302,418,800	2,212,418,800
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	150,000,000	150,000,000	-
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,090,038,000</b>	<b>(509,962,000)</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	650,000,000	628,920,000	(21,080,000)
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	700,000,000	321,818,000	(378,182,000)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250,000,000	139,300,000	(110,700,000)
	<b>190,610,302,856</b>	<b>180,395,508,914</b>	<b>(10,214,793,942)</b>

### 3.4 Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 0-45**  
**Prestasi dan penghargaan Yang Diperoleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020**

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
1	10 September 2021	Penghargaan Pembina TOP BUMD Awards 2021	Top Business BUMD
2	27 Oktober 2021	Penghargaan apresiasi Jawara Ekonomi digital Jawa Barat 2021 sebagai Pemerintah terbaik 1 dalam digitalisasi ekonomi daerah	Provinsi Jawa Barat
3	28 Oktober 2021	Penghargaan Pertumbuhan Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dalam ajang bergengsi event The 3rd west Java investment Summit 2021 sebagai terbaik 1 tingkat Jawa barat sebagai kota dengan nilai investasi PMA tertinggi tingkat Jawa Barat th 2021	Provinsi Jawa Barat
4	02 Desember 2021	penghargaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik tahun 2021. Kota Bekasi mendapatkan peringkat 5 besar	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5	06 Desember 2021	Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021 Tingkat Jawa Barat dengan Kategori peringkat pertama Pemerintah Kabupaten Kota. (PPID)	Komisi Informasi Jabar
6	14 Desember 2021	Penghargaan Terbaik III JDIH Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	Provinsi Jawa Barat

No	Tanggal	Uraian	Penghargaan Dari
7	29 Desember 2021	Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021	Ombudsman Republik Indonesia

Sumber: Data Bagian Humas, 2021

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis sebagai upaya pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju penyelenggaraan *good governance* Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2021.

#### **4.1 kesimpulan**

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, dengan hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 116,34% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, sebesar 125,15%.
2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran, sebesar 102,10 %
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebesar 121,76%.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2021 yaitu 116,34% Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021 ada pada Melampaui/memenuhi Target. Capaian dari IKU tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 0-1**  
**Capaian dari IKU tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	%	39.00	48.81
2	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	%	84.00	87,53
3	Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	%	100.00	100%
4	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A
5	Nilai IKM SETDA	Angka	81.00	85,24
6	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	%	11.36	18.18%

Dari enam target IKU yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 keseluruhan indikator dapat dicapai bahkan untuk beberapa indikator dapat melampaui target.

Walaupun secara umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pemahaman atas data - data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja. Data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (output).
2. Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan bersifat sektoral dan menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.

## 4.2 Rencana Tindak

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan, koordinator pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.
4. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah dapat terlaksana dengan optimal;

Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan kinerja diharapkan bahwa LKIP tahun 2021 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja



WALI KOTA BEKASI

### PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA):

Nama : Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.  
NIP : 19650205 199011 2 002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. RAHMAT EFFENDI  
Jabatan : WALI KOTA BEKASI

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

Indikator Kinerja Program dan Anggaran berdasarkan lampiran I dan II akan dievaluasi setiap tiga (3) bulan oleh Tim Dalev yang dibentuk oleh Wali Kota Bekasi, jika kegiatan pada lampiran tersebut berdasarkan laporan hasil tim tidak dapat memenuhi capaian dan keberhasilan maka **PIHAK PERTAMA** menyatakan mengundurkan diri dari jabatan dan tidak akan melakukan gugatan secara hukum.

PIHAK KEDUA  
WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Bekasi, 19 April 2021

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650205 199011 2 002

**Lampiran I : Indikator Kinerja**

 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	%	39	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	39
2	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	%	84	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84
		Persentase BUMD yang Dibina dan Diawasi	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100
3	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
		Nilai IKM SETDA	Nilai	81	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	81
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	%	11,36	Triwulan I	-
					Triwulan II	11,36
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-

**Jumlah Anggaran**

1. Program Administrasi Umum	Rp	150.484.840.580
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	30.470.616.800
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	5.505.000.000

**PIHAK KEDUA,**  
 WALI KOTA BEKASI,



**Dr. RAHMAT EFFENDI**

**Keterangan**

Anggaran APBD	Rp	186.460.457.380
Anggaran Dekonsentrasi/TP	Rp	-

Bekasi, 19 April 2021

**PIHAK PERTAMA,**  
 SEKRETARIS DAERAH,



**Dr. RENY HENDRAWATI, M.M**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650205 199011 2 002

**Lampiran II : Alokasi Anggaran Per Triwulan**

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Rp 150.484.840.580</b>	<b>Rp 35.632.159.718</b>	<b>Rp 149.124.406.440</b>	<b>Rp 39.512.089.351</b>	<b>Rp 26.116.185.071</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 49.140.313.000	Rp 11.780.097.467	Rp 13.853.100.947	Rp 11.753.557.278	Rp 11.753.557.308	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 3.238.650.000	Rp 503.761.001	Rp 962.613.243	Rp 1.268.514.743	Rp 503.761.013	
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 3.802.737.000	Rp 950.684.250	Rp 950.684.250	Rp 950.684.250	Rp 950.684.250	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 12.675.244.000	Rp 3.168.810.000	Rp 3.168.810.000	Rp 3.168.810.000	Rp 3.168.810.000	
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
6	Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 400.000.000	Rp -	Rp 95.500	Rp 300.000	Rp 399.604.500	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 200.000.000	Rp -	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp 53.620.000	Rp 46.380.000	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000,00				
10	Penyelenggaraan Fasilitas Keprotokolan	Rp 400.000.000		Rp 400.000.000			
11	Penyelenggaraan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Rp 2.100.000.000	Rp 143.487.500,00	Rp 825.000.000,00	Rp 590.000.000,00	Rp 541.512.500,00	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.172.375.000	Rp 295.000.000,00	Rp -	Rp 1.534.510.000,00	Rp 342.865.000,00	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp -	
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.150.000.000	Rp 279.500.000	Rp 357.000.000	Rp 510.500.000	Rp 3.000.000	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.427.340.000	Rp 419.140.000	Rp 381.100.000	Rp 356.100.000	Rp 271.000.000	
17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 26.265.000.000	Rp 5.849.837.500	Rp 10.140.037.500	Rp 6.255.125.000	Rp 4.020.000.000	
18	Pemeliharaan Meubelair	Rp 350.000.000	Rp -	Rp -	Rp 350.000.000	Rp -	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 75.000.000	Rp -	Rp 42.770.000	Rp -	Rp 32.230.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7.000.000.000	Rp 1.750.002.000	Rp 1.750.002.000	Rp 1.750.002.000	Rp 1.749.994.000	
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.183.650.000	Rp 394.216.000	Rp 394.216.000	Rp 395.218.000	Rp -	

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000	Rp -	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 3.200.000.000	Rp 705.000.000	Rp 1.270.000.000	Rp 515.000.000	Rp 710.000.000	
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 344.400.000	Rp 172.200.000	Rp 172.200.000	Rp -	Rp -	
25	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 790.220.000	Rp 403.620.000	Rp 135.900.000	Rp 125.400.000	Rp 125.300.000	
27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 996.220.000	Rp 760.500.000	Rp 78.700.000	Rp 78.600.000	Rp 78.420.000	
28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 2.978.691.580	Rp 309.716.000	Rp 281.304.000	Rp 2.387.671.580	Rp -	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 200.000.000	Rp 68.217.500	Rp 67.559.000	Rp 52.783.500	Rp 11.440.000	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 155.000.000	Rp -	Rp 38.750.000	Rp 38.750.000	Rp 77.500.000	
31	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 4.700.000.000	Rp 284.050.000	Rp 1.407.493.000	Rp 1.832.485.900	Rp 1.175.971.100	
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 500.000.000	Rp 278.644.500	Rp 78.000.000	Rp 78.072.900	Rp 65.282.600	
33	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 95.270.000.000	Rp 4.730.000.000	Rp -	
34	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 250.000.000,00	Rp 64.750.000	Rp -	Rp 175.350.000	Rp 9.900.000	
35	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 350.000.000,00	Rp 25.926.000	Rp 244.991.000	Rp 50.651.000	Rp 28.432.000	
36	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 10.460.000.000,00	Rp -	Rp 10.460.000.000	Rp -	Rp -	
37	Pengadaan Mebel	Rp 6.750.000.000,00	Rp 6.750.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.750.000.000,00	-	Rp 5.750.000.000	Rp -	Rp -	
39	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 231.520.000	Rp 262.403.200	Rp 6.076.800	
40	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 154.360.000	Rp 3.680.000	Rp 41.960.000	
41	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 58.200.000	Rp 41.800.000	Rp -	
<b>II</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp 30.470.616.800</b>	<b>Rp 4.179.797.650</b>	<b>Rp 3.912.851.150</b>	<b>Rp 3.971.660.450</b>	<b>Rp 18.436.307.550</b>	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 450.000.000	Rp 228.182.500	Rp 23.000.000	Rp 190.270.000	Rp 8.547.500	
2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 300.000.000	Rp -	Rp -	Rp 26.640.000	Rp 273.360.000	
3	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 4.671.211.000	Rp 3.159.458.000	Rp 401.837.000	Rp 1.071.736.000	Rp 38.180.000	

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000	Rp -	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 3.200.000.000	Rp 705.000.000	Rp 1.270.000.000	Rp 515.000.000	Rp 710.000.000	
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 344.400.000	Rp 172.200.000	Rp 172.200.000	Rp -	Rp -	
25	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 790.220.000	Rp 403.620.000	Rp 135.900.000	Rp 125.400.000	Rp 125.300.000	
27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 996.220.000	Rp 760.500.000	Rp 78.700.000	Rp 78.600.000	Rp 78.420.000	
28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 2.978.691.580	Rp 309.716.000	Rp 281.304.000	Rp 2.387.671.580	Rp -	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 200.000.000	Rp 68.217.500	Rp 67.559.000	Rp 52.783.500	Rp 11.440.000	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 155.000.000	Rp -	Rp 38.750.000	Rp 38.750.000	Rp 77.500.000	
31	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 4.700.000.000	Rp 284.050.000	Rp 1.407.493.000	Rp 1.832.485.900	Rp 1.175.971.100	
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 500.000.000	Rp 278.644.500	Rp 78.000.000	Rp 78.072.900	Rp 65.282.600	
33	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 95.270.000.000	Rp 4.730.000.000	Rp -	
34	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 250.000.000,00	Rp 64.750.000	Rp -	Rp 175.350.000	Rp 9.900.000	
35	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 350.000.000,00	Rp 25.926.000	Rp 244.991.000	Rp 50.651.000	Rp 28.432.000	
36	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 10.460.000.000,00	Rp -	Rp 10.460.000.000	Rp -	Rp -	
37	Pengadaan Mebel	Rp 6.750.000.000,00	Rp 6.750.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.750.000.000,00	Rp -	Rp 5.750.000.000	Rp -	Rp -	
39	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 231.520.000	Rp 262.403.200	Rp 6.076.800	
40	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 154.360.000	Rp 3.680.000	Rp 41.960.000	
41	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 58.200.000	Rp 41.800.000	Rp -	
<b>II</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp 30.470.616.800</b>	<b>Rp 4.179.797.650</b>	<b>Rp 3.912.851.150</b>	<b>Rp 3.971.660.450</b>	<b>Rp 18.436.307.550</b>	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 450.000.000	Rp 228.182.500	Rp 23.000.000	Rp 190.270.000	Rp 8.547.500	
2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 300.000.000	Rp -	Rp -	Rp 26.640.000	Rp 273.360.000	
3	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 4.671.211.000	Rp 3.159.458.000	Rp 401.837.000	Rp 1.071.736.000	Rp 38.180.000	

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 19.119.405.800	Rp 490.997.250	Rp 2.500.642.950	Rp 2.307.823.250	Rp 13.819.942.350	
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 4.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.000.000.000	
6	Fasilitasinya Bantuan Hukum	Rp 550.000.000,00	Rp 137.500.000	Rp 137.500.000	Rp 137.500.000	Rp 137.500.000	
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 500.000.000,00	Rp 20.736.400	Rp 312.596.200	Rp 121.211.200	Rp 45.456.200	
8	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 150.000.000,00	-	Rp 59.699.000	Rp 81.626.500	Rp 8.674.500	
9	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 700.000.000	Rp 141.073.500	Rp 472.026.000	Rp 29.303.500	Rp 87.597.000	
10	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp 30.000.000	Rp 1.850.000	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	Rp 17.050.000	
<b>III</b>	<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>Rp 5.505.000.000</b>	<b>Rp 793.935.000</b>	<b>Rp 2.149.401.800</b>	<b>Rp 1.981.718.700</b>	<b>Rp 579.944.500</b>	
1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 650.000.000	Rp -	Rp 354.850.000	Rp 295.150.000	Rp -	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BI UD	Rp 590.000.000	Rp -	Rp 70.350.000	Rp 457.190.000	Rp 62.460.000	
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp 275.000.000	Rp 34.920.000	Rp 128.200.000	Rp 111.880.000	Rp -	
4	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 150.000.000	Rp 60.105.000	Rp 39.965.000	Rp 9.965.000	Rp 39.965.000	
5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 2.090.000.000	Rp 681.000.000	Rp 962.553.800	Rp 446.446.200	Rp -	
6	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	
7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 650.000.000	Rp -	Rp 271.250.000	Rp 192.822.000	Rp 185.928.000	
8	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp 700.000.000	Rp -	Rp 134.323.000	Rp 274.085.500	Rp 291.591.500	
9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 250.000.000	Rp 17.910.000	Rp 112.910.000	Rp 119.180.000	Rp -	

Bekasi, 19 April 2021

**PIHAK KEDUA,**  
 WALI KOTA BEKASI,


**Dr. RAHMAT EFFENDI**
**PIHAK PERTAMA,**  
 SEKRETARIS DAERAH,


**Dr. RENY HENDRAWATI, M.M**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650205 199011 2 002

**LAMPIRAN II**  
**Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021**

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>144.296.518.614</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.165.313.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.090.313.000
4.01 . 4.01.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>110.410.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.450.000
4.01 . 4.01.01.01.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	79.960.000
<b>4.01 . 4.01.01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
4.01 . 4.01.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>4.01 . 4.01.01.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.452.877.400</b>
4.01 . 4.01.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0
4.01 . 4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.761.360.000
4.01 . 4.01.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
4.01 . 4.01.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	444.142.400
4.01 . 4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.572.375.000
4.01 . 4.01.01.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.993.292.095</b>
4.01 . 4.01.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.805.000.000
4.01 . 4.01.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	5.372.004.595
4.01 . 4.01.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.816.287.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.536.826.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
4.01 . 4.01.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.183.650.000
4.01 . 4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.153.176.000

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.237.039.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.427.340.000
4.01 . 4.01.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	350.000.000
4.01 . 4.01.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.309.699.000
4.01 . 4.01.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.15</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>7.494.186.619</b>
4.01 . 4.01.01.01.15.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.238.650.000
4.01 . 4.01.01.01.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	344.400.000
4.01 . 4.01.01.01.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000
4.01 . 4.01.01.01.15.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.861.136.619
<b>4.01 . 4.01.01.01.16</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>3.458.710.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.16.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	790.220.000
4.01 . 4.01.01.01.16.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	996.220.000
4.01 . 4.01.01.01.16.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.672.270.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.17</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>597.864.500</b>
4.01 . 4.01.01.01.17.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	70.000.000
4.01 . 4.01.01.01.17.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	77.864.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.18</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>7.000.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.18.01	Fasilitasi Keprotokolanan	400000000
4.01 . 4.01.01.01.18.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.900.000.000
4.01 . 4.01.01.01.18.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.700.000.000
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>29.427.893.500</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.19</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>4.355.538.500</b>
4.01 . 4.01.01.07.19.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	0
4.01 . 4.01.01.07.19.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi	4.190.526.000
4.01 . 4.01.01.07.19.03	Pelaksanaan Otonomi Daerah	165.012.500
<b>4.01 . 4.01.01.01.20</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>23.643.637.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.20.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	19.643.637.000
4.01 . 4.01.01.01.20.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.000.000.000

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.21</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>798.718.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.21.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	336.890.000
4.01 . 4.01.01.01.21.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	399.280.000
4.01 . 4.01.01.01.21.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	62.548.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.22</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>630.000.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.22.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	600.000.000
4.01 . 4.01.01.01.22.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6.671.096.800</b>
<b>4.01 . 4.01.01.01.23</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>978.640.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.23.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	528.640.000
4.01 . 4.01.01.01.23.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450.000.000
4.01 . 4.01.01.01.23.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0
<b>4.01 . 4.01.01.01.24</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>4.602.418.800</b>
4.01 . 4.01.01.01.24.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.000.000
4.01 . 4.01.01.01.24.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.302.418.800
4.01 . 4.01.01.01.24.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	150.000.000
<b>4.01 . 4.01.01.01.25</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.090.038.000</b>
4.01 . 4.01.01.01.25.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	628.920.000
4.01 . 4.01.01.01.25.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	321.818.000
4.01 . 4.01.01.01.25.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.300.000
		<b>180.395.508.914</b>

**LAMPIRAN III**  
**Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi**

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Program Administrasi Umum</b>							
	<b>Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>86,657,913,019</b>	<b>100 %</b>	<b>76,348,636,225</b>	<b>100</b>	<b>88.10</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>50,000,000</b>		<b>47,432,000</b>	<b>500</b>	<b>94.86</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	20 Dokumen	50,000,000.00	20 Dokumen	47,432,000	100	94.86
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>47,165,313,000</b>		<b>45,812,789,517</b>	<b>100</b>	<b>97.13</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN yang dibayarkan (223x14bulan)	3122 Orang/Bulan	47,090,313,000.00	3,122 Orang/Bulan	45,766,048,267	100	97.19
	Pembayaran Tunjangan ASN yang dibayarkan (236x12bulan)	2832 Orang/Bulan		2,832 Orang/Bulan			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	24 Laporan	75,000,000.00	24 Laporan	46,741,250	100	62.32
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000</b>		<b>198,520,000</b>	<b>100</b>	<b>99.26</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Bahan Pakaian Dinas	- Meter kain	-	- Meter kain	-	-	-
	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	- Stel		Stel			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Informasi Yang diSebarluaskan Melalui Media Radio	82 Kali Siar	200,000,000	82 Kali Siar	198,520,000	100	99.26
	Jumlah Media Massa Yang Berkerjasama Dengan Pemerintah Kota Bekasi	4 Media		4 Media			
	Jumlah Lokasi Penyebarluasan Informasi Di Media Luar Ruang	75 Lokasi		75 Lokasi			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Orang	-	- Orang	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>6,452,877,400</b>		<b>5,295,475,273</b>	<b>101.97</b>	<b>82.06</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/ Penerangan Bangunan	4051 Unit	150,000,000	4,051 Unit	149,454,690	100	99.64
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	- Jenis	-	- Jenis	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	20600 Unit	3,761,360,000	20,000 Unit	3,604,977,600	97.21	95.84
	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	149655 Pack		145,655 Pack			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	20423 Unit	350,000,000	20,423 Unit	321,289,000	100	91.80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	11000 Eksemplar	100,000,000	11,000 Eksemplar	6,720,000	100	6.72
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Tamu Pemerintah Daerah	65 Kali	444,142,400	65 Kali	328,585,000	100	73.98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas	350 Kali	1,572,375,000	408 Kali	818,931,583	116.57	52.08
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/dikelola	500 Box	75,000,000	500 Box	65,517,400	100	87.36
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>19,536,826,000</b>		<b>17,168,768,709</b>	<b>100</b>	<b>87.88</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen/Surat Dinas Terkirim	- Surat/ Dokumen	-	- Surat/ Dokumen	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faximile/Internet, TV Kabel	432 Rekening/ Bulan	5,200,000,000	432 Rekening/ Bulan	4,714,269,140	100	90.66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104897 Unit	1,183,650,000	104,897.00 Unit	474,991,000	100	40.13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	2352 Orang/ Bulan	13,153,176,000	2,352.00 Orang/ Bulan	11,979,508,569	100	91.08
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>7,494,186,619</b>		<b>3,468,427,065</b>	<b>100</b>	<b>46.28</b>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	24 Orang/ Bulan	3,238,650,000	24 Orang/ Bulan	169,478,536	100	5.23
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	54 Stel	344,400,000	54 Stel	156,800,000	100	45.53
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Peserta Medical Check Up	4 Orang	50,000,000	4 Orang	50,000,000	-	-
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Tunjangan Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota	24 Orang/ Bulan	3,861,136,619	24 Orang/ Bulan	3,092,148,529	100	80.08
<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Tingkat Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3,458,710,000</b>		<b>2,253,542,911</b>	<b>100</b>	<b>65.16</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Bulan	790,220,000	12 Bulan	493,227,878	100	62.42
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	996,220,000	12 Bulan	830,999,284	100	83.42
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Bulan	1,672,270,000	12 Bulan	929,315,749	100	55.57
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2,300,000,000</b>		<b>2,103,680,750</b>	<b>100</b>	<b>91.46</b>
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Piala Kejuaraan dan Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	61 Unit	400,000,000	61 Unit	384,425,000	100	96.11
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keprotokolan	181 Unit		181 Unit			
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Analisa Kebijakan Pemerintah yang disusun oleh Staf Ahli	- -	1,900,000,000	- -	1,719,255,750	100	90.49
	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi Wali Kota dan Wakil Wali Kotra dengan Masyarakat Organisasi Sosial	75 Kali		75 Kali			
	<b>Cakupan Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan</b>	<b>100 %</b>	<b>4,700,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>3,450,748,000</b>	<b>100</b>	<b>73.42</b>
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4,700,000,000</b>		<b>3,450,748,000</b>	<b>100</b>	<b>73.42</b>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan dokumentasi tugas pimpinan	6 laporan	4,700,000,000	6 laporan	3,450,748,000	100	73.42
	<b>Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>33,237,039,000</b>	<b>100 %</b>	<b>31,731,914,452</b>	<b>100</b>	<b>95.47</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>33,237,039,000</b>		<b>31,731,914,452</b>	<b>100</b>	<b>95.47</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	168 Unit	1,427,340,000	168 Unit	1,346,815,302	100	94.36
Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	350,000,000	12 Bulan	167,080,000	100	47.74
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Titik Pemeliharaan	25 Titik	30,309,699,000	25 Titik	29,184,376,857	100	96.29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	140 Unit	1,150,000,000	140 Unit	1,033,642,293	100	89.88
	<b>Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>19,103,702,095</b>	<b>100 %</b>	<b>17,381,891,505</b>	<b>100</b>	<b>90.99</b>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>110,410,000</b>		<b>95,544,000</b>	<b>100</b>	<b>86.54</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	1 Dokumen	30,450,000	1 Dokumen	28,694,000	100	94.23
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan BMD	- Orang	79,960,000	- Orang	66,850,000	100	83.6
	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian BMD	8 Kali		8 Kali			
	Sarana dan Prasarana Pengendalian BMD	4 Unit		4 Unit			
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>18,993,292,095</b>		<b>17,286,347,505</b>	<b>100</b>	<b>91.01</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	17 unit	6,805,000,000	17 unit	6,137,118,010	100	90.19
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1718 unit	5,372,004,595	1,718.00 unit	5,306,664,595	100	98.78

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	645 unit	6,816,287,500	645 unit	5,842,564,900	100	85.71
	<b>Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>597,864,500</b>	<b>100 %</b>	<b>426,416,803</b>	<b>100</b>	<b>71.32</b>
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi</b>	<b>100 %</b>	<b>520,000,000</b>		<b>387,563,303</b>	<b>100</b>	<b>74.53</b>
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelembagaan	44 Laporan	250,000,000	44 Laporan	146,003,803	100	58.4
	Jumlah Peserta Bimtek Analisis Jabatan	100 Orang		100 Orang			
	Jumlah Peserta Workshop Standar Kompetensi Jabatan	100 Orang		100 Orang			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	189,507,500	100	94.75
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta FGD Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	50 Orang	70,000,000	50 Orang	52,052,000	100	74.36
	Jumlah Peserta Bimtek Reformasi Birokrasi	100 Orang		100 Orang			
	<b>Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>50 %</b>	<b>77,864,500</b>	<b>93.18 %</b>	<b>38,853,500</b>	<b>186.36</b>	<b>49.90</b>
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas</b>	<b>100 %</b>	<b>77,864,500</b>		<b>38,853,500</b>	<b>100</b>	<b>49.90</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP OPD Tahun 2021 yang dilaporkan	44 Dokumen	77,864,500	44 Dokumen	38,853,500	100	49.9
	Jumlah LKIP Kota Bekasi Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Peserta Workshop SAKIP Tahun 2021	103 Orang		103 Orang			
<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>							
	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan</b>	<b>70 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>142.86</b>	<b>-</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan</b>	<b>- %</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal	- Laporan	-	- Laporan	-	-	-
	Jumlah Peserta Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal	- Orang		- Orang			
	<b>Presentase peningkatan profile kelurahan</b>	<b>75 %</b>	<b>4,190,526,000</b>	<b>96.43 %</b>	<b>4,186,926,000</b>	<b>128.57</b>	<b>99.91</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Status Profil Kelurahan (Sesuai PP 18 Tahun 2016)</b>	<b>100 %</b>	<b>4,190,526,000</b>		<b>4,186,926,000</b>	<b>100</b>	<b>99.91</b>
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam hal kinerja kecamatan	- Kecamatan	4,190,526,000	2 Kecamatan	4,186,926,000	100	99.91
	Jumlah Kelurahan yang mengisi data dan update Prodeskel	56 Kelurahan		56 Kelurahan			
	Jumlah laporan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan K3	- Dokumen		- Dokumen			
	Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan			
	Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kota	1 Laporan		1 Laporan			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tingkat Kota	- Dokumen		- Dokumen			
	Jumlah Laporan Profil Desa dan Kelurahan se-Kota Bekasi	- Dokumen		- Dokumen			
	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi K3	- Kecamatan		- Kecamatan			
	Jumlah Penerima Hibah di Kota Bekasi	73 Penerima Hibah		73 Penerima Hibah			
	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kinerja Kelurahan se-Kota Bekasi	1 Kali		- Kali			
	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi	- Kecamatan		- Kecamatan			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Penyelenggaraan Penilaian BBGRM Tingkat Kota Bekasi	- Kali		- Kali			
	Jumlah Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kecamatan	- Perwal		- Perwal			
	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pencanaan dan Penutupan BBGRM Tingkat Kota	- Orang		- Orang			
	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Workshop Prodeskel	- Orang		- Orang			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi K3	- Orang		- Orang			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	- Orang		- Orang			
	Jumlah Peta Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi	- Peta		- Peta			
	Jumlah Profil Batas Wilayah	- Dokumen		- Dokumen			
	<b>Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah</b>	<b>50 %</b>	<b>165,012,500</b>	<b>68.18 %</b>	<b>67,428,900</b>	<b>136.36</b>	<b>40.86</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>165,012,500</b>		<b>67,428,900</b>	<b>100</b>	<b>40.86</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan Penyusunan LPPD Tahun 2020	- Kegiatan	165,012,500	- Kegiatan	67,428,900	100	40.86
	Jumlah Laporan LPPD Kota Bekasi Tahun 2020 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2020	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan tentang SPM	90 Orang		90 Orang			
	Jumlah Peserta Sosialisasi PP Nomor 13 Tahun 2019	138 Orang		138 Orang			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<b>Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya</b>	<b>100 %</b>	<b>19,643,637,000</b>	<b>75 %</b>	<b>18,407,693,509</b>	<b>75.00</b>	<b>93.71</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya</b>	<b>100 %</b>	<b>19,643,637,000</b>		<b>18,407,693,509</b>	<b>97.92</b>	<b>93.71</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Pengelolaan Operasional Mesjid Agung Al Barkah Kota Bekasi	12 Bulan	19,643,637,000	12 Bulan	18,407,693,509	97.92	93.71
	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Pembersih Masjid	- Jenis		- Jenis			
	Jumlah Calon Petugas Tim Pemandu Haji daerah yang diseleksi	- Peserta		- Peserta			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi	12 Dokumen		9 Dokumen			
	Jumlah Event Peringatan Hari AIDS Se Dunia	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
	Jumlah Frekuensi Keikutsertaan Kota Bekasi dalam event MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
	Jumlah Frekuensi Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)	1 Kali		1 Kali			
	Jumlah Frekuensi Tarawih Keliling di Kota Bekasi	7 Kali		7 Kali			
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana	- Kegiatan		1 Kegiatan			
	Jumlah Kloter Calon Jemaah Haji yang dilayani dan difasilitasi	- Kloter		- Kloter			
	Jumlah Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori/Qoriah Kota Bekasi	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Kota Bekasi	6 Hari		6 Hari			
	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi	9 Hari		9 Hari			
	Jumlah Pembinaan Peserta Qori/Qoriah	- Kegiatan		1 Kegiatan			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bantuan Hibah Kepada Masyarakat	50 LPJ		50 LPJ			
	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>2,917,895,000</b>	<b>100.00</b>	<b>72.95</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial</b>	100 %	<b>4,000,000,000</b>		<b>2,917,895,000</b>	<b>100</b>	<b>72.95</b>
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan	426 Orang	4,000,000,000	- Orang	2,917,895,000	100	72.95
	Jumlah mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan (DID)	1348 Orang		1,348.00 Orang			
	<b>Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan</b>	<b>100 %</b>	<b>399,438,000</b>	<b>100 %</b>	<b>285,266,835</b>	<b>100.00</b>	<b>71.42</b>
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan</b>	100 %	<b>399,438,000</b>		<b>285,266,835</b>	<b>101.9</b>	<b>71.42</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Evaluasi Produk Hukum	1 Dokumen	336,890,000	1 Dokumen	258,681,235	103.8	76.79
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	150 Orang		150 Orang			
	Rancangan Produk Hukum Daerah (Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota)	500 Produk Hukum Daerah		595 Produk Hukum Daerah			
	Raperda yang sudah di Asistensi	10 Raperda		10 Raperda			
	Raperda yang sudah di Bahas	10 Raperda		10 Raperda			
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Cetak Peraturan Daerah Kota Bekasi	- Buku/ LD/ Perda	62,548,000	- Buku/ LD/ Perda	26,585,600	100	42.5
	Jumlah Peserta Sosialisasi	700 Orang		700 Orang			
	Pengelolaan Website jdih.bekasikota.go.id	1 Tahun		9 Tahun			
	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum yang Terkelola dan Terdokumentasi	1000 Keputusan		1,000.00 Keputusan			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<b>Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah</b>	<b>95 %</b>	<b>399,280,000</b>	<b>100 %</b>	<b>102,280,000</b>	<b>105.26</b>	<b>25.62</b>
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah</b>	100 %	<b>399,280,000</b>		<b>102,280,000</b>	<b>100</b>	<b>25.62</b>
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Peserta Penyuluh Hukum	800 Orang	399,280,000	800 Orang	102,280,000	100	25.62
	Persentase Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	100 Persen		100 Persen			
	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	100 Persen		100 Persen			
	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>630,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>412,980,600</b>	<b>100</b>	<b>65.55</b>
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>	100 %	<b>630,000,000</b>		<b>412,980,600</b>	<b>90.19</b>	<b>65.55</b>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Frekuensi Pendampingan dengan Tim Kejaksaan	2 Kali	600,000,000	2 Kali	387,548,700	105.56	64.59
	Frekuensi Rapat Ekspose Pemrakarsa Kerja Sama	35 Kali		35 Kali			
	Frekuensi Rapat Penyusunan Draft Kerja Sama	40 Kali		40 Kali			
	Jumlah daftar rencana program dan kegiatan kerja sama daerah	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Keikutsertaan dalam event Rakerkomwil, Muskomwil dan Rakorkomwil	3 Event		4 Event			
	Pengadaan sarana dan prasarana Database Kerja Sama	7 Jenis		7 Jenis			
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Frekuensi monitoring perjanjian kerja sama	55 Kali		30,000,000			
	Frekuensi Rapat evaluasi perjanjian kerja sama	35 Kali	25 Kali				
<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>			<b>5.581.058.800</b>		<b>5.115.045.350</b>		<b>91.52</b>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<b>Jumlah Bidang Usaha BUMD</b>	<b>5 Bidang Usaha</b>	<b>528.640.000</b>	<b>5 Bidang Usaha</b>	<b>417.230.000</b>	<b>100</b>	<b>83.97</b>
	<b>Persentase Peningkatan Deviden BUMD</b>	<b>1.25 %</b>		<b>15.92 %</b>		<b>1273.60</b>	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Bidang Usaha BUMD</b>	<b>5 Bidang Usaha</b>	<b>528.640.000</b>	<b>5 Bidang Usaha</b>	<b>417.230.000</b>	<b>100</b>	<b>83.97</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi	1 Aplikasi	<b>5.581.058.800</b>	1 Aplikasi	417,230,000	100	78.93
	Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Direksi PD. Mitra Patriot Kota Bekasi	1 Laporan		1 Laporan			
	Jumlah Dokumen Draf RKAP BUMD Kota Bekasi	- Dokumen		- Dokumen			
	Jumlah Dokumen Kajian Pembentukan Kelembagaan BUMD Pengelolaan Sampah	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BUMD Tahun Buku 2020	1 Laporan		1 Laporan			
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajerial Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi	- Peserta		- Peserta			
	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi</b>	<b>100 %</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>404,560,000</b>	<b>100</b>	<b>89.90</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi</b>	<b>100 %</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>404,560,000</b>	<b>100</b>	<b>89.90</b>
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kajian Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Bekasi	- Dokumen	450,000,000	- Dokumen	404,560,000	100	89.9
	Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 (Laporan Triwulan Dan Laporan Tahunan)	5 Laporan		5 Laporan			
	Jumlah Operasi Pemberantasan Terhadap Barang Kena Cukai Ilegal (DBH-CHT)	26 Kali (DBH-CHT)		26 Kali (DBH-CHT)			
	Laporan Hasil Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH-CHT)	1 Laporan (DBH-CHT)		1 Laporan (DBH-CHT)			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Kajian Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bekasi	- Laporan	-	- Laporan	-	-	-
	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>4,602,418,800</b>	<b>100 %</b>	<b>4,293,255,350</b>	<b>100</b>	<b>93.28</b>
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan</b>	<b>100 %</b>	<b>4,602,418,800</b>	<b>100 %</b>	<b>4,293,255,350</b>	<b>100</b>	<b>93.28</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	147,645,500	100	98.43
	Jumlah Dokumen Standar Biaya Umum (SBU)	1 Dokumen		1 Dokumen			
	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen		1 Dokumen			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pembukaan dan penutupan TMMD	- Event	4,302,418,800	- Event	4,004,039,850	100	93.06
	Jumlah kajian rekomendasi kepada Wali Kota tentang kebijakan perangkat daerah	108 Laporan		108 Laporan			
	Jumlah Laporan Monitoring Pembangunan	- Laporan		- Laporan			
	Jumlah Monitoring Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kali		- Kali			
	Jumlah Pelatihan LPM Berprestasi Tk. Kota Bekasi	- Kali		- Kali			
	Jumlah peserta Pembinaan SDM LPM	- Orang		- Orang			
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Bulanan Progres Pelaksanaan Barang/Jasa	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	141,570,000	100	94.38
	Jumlah Laporan Bulanan Progres Pelaksanaan Kegiatan	12 Laporan		12 Laporan			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Progres Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan		2 Laporan			
	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Simpelbang	2 Laporan		2 Laporan			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Kinerja dan Anggaran Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun (2021) (%)	
				12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<b>Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,090,038,000</b>	<b>100 %</b>	<b>470,322,456</b>	<b>100</b>	<b>43.15</b>
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,090,038,000</b>	<b>98.55 %</b>	<b>470,322,456</b>	<b>98.55</b>	<b>43.15</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Tersedia	1 Aplikasi	628,920,000	1 Aplikasi	189,472,456	100	30.13
	Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Rakor/Pelatihan /seminar/Training	72 Orang		72 Orang			
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	e-Katalog Lokal/Daerah	- Sistem	321,818,000	- Sistem	188,900,000	100	58.7
	Jumlah penyedia barang/jasa yang mengikuti bimtek SPSE	40 Orang		40 Orang			
	Kajian pembentukan e-Katalog Lokal/Daerah	- Dokumen		- Dokumen			
	Pemeliharaan DRC Server LPSE Kota Bekasi	12 Bulan		12 Bulan			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Konsultasi dan/atau Clearing House Pengadaan	41 Kali	139,300,000	40 Kali	91,950,000	95.65	66.01
	Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang Mengikuti Bimtek/FGD/Sosialisasi/Rakor/Pelatihan /Seminar/Training	160 Orang		150 Orang			

**LAMPIRAN IV**  
**Prestasi Dan Penghargaan**

**1. Penghargaan Pembina TOP BUMD Awards 2021**



**2. Penghargaan apresiasi Juara Ekonomi digital Jawa Barat 2021 sebagai Pemerintah terbaik 1 dalam digitalisasi ekonomi daerah**



**3. penghargaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**





**7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021**

